BAB I

PENDAHULUAN

Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Badung harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya setiap tahun yaitu dengan menyusun Laporan Keuangan. Hal itu sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang No.17 tahun 2003, mewajibkan Presiden dan Gubernur/Walikota/Bupati untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa Laporan Keuangan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang No. 17 Tahun 2013 pasal 32 bahwa bentuk dan isi Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung telah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan(SAP), dimana Laporan keuangan yang disusun sebanyak 7 (tujuh) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas(LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Laporan tersebut merupakan Laporan pokok dan selanjutnya dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD dan Dana diluar APBD Kabupaten Badung (Dana BOS dan JKN)

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

- a) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- b) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca,
- c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 184 ayat (1) dan (3) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- e) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PP SAP) tertanggal 22 Oktober 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini meliputi SAP Berbasis AkruaI dan SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI. SAP Berbasis AkruaI terdapat pada Lampiran I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI pada Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis AkruaI.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- k) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2015;
- l) Peraturan Bupati Badung Nomor 66 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2015;
- m) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2015;
- n) Peraturan Bupati Badung Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Badung Nomor 66 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2015 ;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dan Kendala/Hambatan Pencapaian Target

III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Pelaporan
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Transisi Laporan Keuangan dari Basis Kas Modifikasian ke Basis Akrual.

V. Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1. Pendapatan - LRA
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Pembiayaan
- 5.2. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- 5.3. Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)
 - 5.3.1. Pendapatan - LO
 - 5.3.2. Beban
 - 5.3.3. Kegiatan Non Operasional
 - 5.3.4. Akun Luar Biasa

5.4. Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)4.5. Penjelasan Akun-Akun Neraca

5.5.1. Aset

5.5.2. Kewajiban

5.5.3. Ekuitas

5.6. Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)

5.6.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

5.6.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

5.6.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

5.6.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

VI. Pengungkapan Informasi Penting Lainnya.

6.1. Penggantian Manajemen Selama tahun Berjalan

6.2. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi manajemen baru

6.3. Komitmen dan kontinjensi

6.4. Penggabungan atau pemekaran entitas akuntansi pada tahun berjalan

6.5. Kejadian yang berdampak sosial

6.6. Pengungkapan Lainnya

4.1.1. Domisili

4.1.2. Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional (jika tidak disebut di awal)

4.1.3. Struktur Organisasi>

VII. Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Pandangan yang menyatakan bahwa maju tidaknya suatu negara dapat dilihat dari struktur ekonomi yang semakin lama bergerak dari perekonomian primer menuju perekonomian tersier tanpa diimbangi dengan perekonomian primer akan mengalami perekonomian yang tidak seimbang dan sangat rentan terhadap gangguan terutama gangguan ekasternal. Sektor primer yang sebagian besar merupakan sektor penopang konsumsi makanan kita terutama pertanian sebaiknya memiliki peranan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk di suatu wilayah. Jika sektor ini terus tergerus maka pada akhirnya wilayah tersebut akan sangat tergantung dari luar.

Perekonomian suatu wilayah sebaiknya menuju suatu struktur perekonomian yang ideal, dalam artian antara sektor primer, sekunder dan tersier berada dalam komposisi yang pas sehingga antara satu sektor dengan sektor lainnya saling mendukung. Dalam keadaan suatu sektor mengalami kemunduran, ekonomi wilayah tersebut masih dapat berjalan karena masih ditopang oleh sektor lainnya

Perekonomian Kabupaten Badung pada tahun 2014 mengalami percepatan ekonomi yaitu tumbuh sebesar 6,97 persen. Kabupaten Badung merupakan salah satu kabupaten yang memiliki pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan ekonomi Propinsi Bali, selain Kota Denpasar, Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Gianyar.

Sektor Pariwisata sangat berperan dalam pembentukan besarnya nilai tambah ini. Banyaknya Obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Badung memberi sumbangan besar terhadap perkembangan perekonomian Kabupaten Badung.

Kabupaten Badung sebagai salah satu kabupaten di Bali merupakan destinasi utama bagi para wisatawan baik lokal maupun mancanegara telah menunjukkan kontribusinya dalam meningkatkan perekonomian Bali. Dampak inflasi dan perubahan ekonomi global juga berpengaruh pada perekonomian Kabupaten Badung. Selain faktor eksternal tersebut, faktor internal juga tidak kalah menyumbang perlambatan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Badung

Kondisi Geografis Kabupaten Badung sangat potensial untuk dimaksimalkan sehingga nilai tambah yang dihasilkan menapai keadaan yang sustainable economic. Dalam Artian, perekonomian berjalan secara berkelanjutan, tidak saja mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian alam dan lingkungan serta merusak sumber daya alam. Dengan wilayah Badung Selatan yang menjorok ke laut dan cenderung kering, lahan diselatan dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan kepariwisataan baik alami maupun buatan, Sedangkan Wilayah Utara Badung merupakan wilayah pegunungan yang sangat cocok untuk pertanian secara umum. Jika hal ini dapat dikelola dengan baik, maka kedua wilayah Badung Selatan sangat membutuhkan pasokan bahan-bahan pertanian yang dipasok oleh wilayah Badung Utara

Selama periode 2010 - 2014, Struktur perekonomian Badung masih didominasi oleh Lapangan usaha Akomodasi dan Lapangan Usaha Transportasi. Fasilitas pariwisata terlengkap dan terbanyak jika dibandingkan dengan Kabupaten ataupun kota yang ada di Bali. Selain itu, Bandara Internasional juga terdapat di Kabupaten Badung. Satu-satunya Bandara yang ada di Bali ini sebagai penyumbang tersebar di lapangan usaha transportasi selain transportasi darat. Bandara Ngurah Rai merupakan pintu Gerbang utama masuknya wisatawan, baik wisatawan Mancanegara maupun domestik. Kunjungan wisatawan mancanegara mengalami kenaikan cukup signifikan tahun 2011 sebesar 2,6 juta orang menjadi 3,8 juta orang pada tahun 2014, sehingga dengan adanya peningkatan kunjungan wisman ini mengakibatkan nilai tambah di lapangan usaha transportasi sekaligus juga terhadap lapangan usaha akomodasi. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1. Nilai PDRB , Distribusi dan Laju Pertumbuhan Tahun 2014 Menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha		2011	2012	2013	2014
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	8,06	7,72	7,4	6,79
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,37	0,39	0,38	0,35
3.	Industri Pengolahan	4,58	4,36	4,21	4,01
4.	Pengadaan Listrik dan gas	0,17	0,15	0,12	0,13
5.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,31	0,27	0,25	0,23
6.	Konstruksi Perdagangan Bebas dan eceran	9,3	10,3	9,82	8,68
7.	Reparasi mobil dan sepeda motor	7,54	7,08	6,77	6,51
8.	Transportasi dan pergudangan	20,29	20,63	21,75	23,83
9.	Penyediaan Akomodasi dan makan minum	25,3	26,42	27,71	29,18
10.	Informasi dan komunikasi	7,16	6,74	6,11	5,57
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,67	2,77	2,82	2,69
12.	Real estat	3,89	3,67	3,54	3,35
13.	Jasa Perusahaan	0,78	0,73	0,71	0,67
14.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	4,25	3,77	3,28	3,1
15.	Jasa pendidikan	3,26	3,01	3,16	3,02
16.	Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial	1,26	1,21	1,23	1,17
17.	Jasa lainnya	0,81	0,77	0,75	0,72
PDRB		100	100	7,17	6,41

2.2 Nilai PDRB Kabupaten Badung

Potret Kinerja perekonomian Kabupaten Badung periode 2010 -2014 yang ditopang industri pariwisata secara nyata tergambar pada peningkatan nilai PDRB Kabupaten Badung yang dihasilkan oleh masing-masing lapangan usaha. Total Nilai tambah yang tercipta (PDRB atas dasar harga berlaku) pada Tahun 2014 sebesar 37,06 Triliyun meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 31,79 triliyun. Nilai tambah ini termasuk yang terbesar di Propinsi Bali. Hal ini tidak terlepas dari berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Badung

Sektor pariwisata sangat berperan dalam pembentukan besar nilai tambah ini, banyaknya Obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Badung memberi sumbangan besar terhadap perkembangan perekonomian Kabupaten Badung. Hal ini dapat terlihat dari besarnya nilai tambah lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yang sebesar Rp. 10,82 Triliyun. dari seluruh nilai tambah pada lapangan usaha ini, penyediaan akomodasi memberikan kontribusi sebesar 73,42 persen, sedangkan penyediaan makan minum memberikan kontribusi sebesar 26,58 persen

Selain sebagai destinasi pariwisata, Kabupaten Badung juga menjadi tempat pertemuan-pertemuan penting yang berskala nasional dan internasional. Hal ini berpengaruh terhadap berbagai sektor yang berkembang di Badung terutama sektor-sektor yang berkaitan erat dengan pariwisata. Seperti misalnya sektor perdagangan hotel dan restoran serta sektor pengangkutan dan komunikasi masih menjadi sektor yang berperan penting dalam perkembangan perekonomian di Badung. Bahkan kedua sektor ini berkontribusi hampir mencapai tiga per empat (72,34 persen) dari keseluruhan PDRB Badung.

PDRB Perkapita merupakan suatu indikator yang dihitung dengan cara membagi data PDRB terhadap jumlah penduduk pada pertengahan Tahun. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang seberapa besar nilai tambah yang diciptakan atau diterima tiap-tiap penduduk, sehingga secara tidak langsung akan menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk didaerah atau wilayah bersangkutan. Semakin besar nilai PDRB Perkapita, maka dapat dikatakan suatu daerah atau wilayah makin sejahtera dan makmur. kendati demikian, mesti diingat bahwa PDRB per Kapita merupakan angka agregat (rata-rata) sehingga masih sngat kasar jika dijadikan cerminan bagi tingkat kesejahteraan penduduk.

Perlu digaris bawahi bahwa PDRB perkapita dapat memicu peningkatan kesejahteraan manakala pemilik akumulasi modal dimiliki oleh penduduk domestik wilayah tersebut dalam hal ini penduduk Kabupaten Badung. Walaupun demikian, angka PDRB perkapita dapat dijadikan sebagai gambaran kasar apakah perekonomian yang terjadi di Kabupaten Badung mengalami perkembangan positif secara makro atau tidak

2.3 Struktur Perekonomian

Untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh suatu daerah, dapat dilihat melalui struktur perekonomiannya. Struktur perekonomian suatu daerah merupakan gambaran komposisi seluruh kegiatan produksi di tempat itu. Perubahan struktur ekonomi pada suatu daerah tergantung pada komposisi masing-masing sektor produksi. Jika terjadi pergeseran dalam komposisi masing-masing sektor, maka struktur perekonomiannya juga berubah. Salah satu indikator yang dipakai untuk mengamati struktur perekonomian suatu daerah adalah distribusi persentase nilai tambah bruto sektoral.

Dengan mengetahui struktur perekonomian suatu daerah maka perencanaan pembangunan ekonomi di daerah tersebut akan menjadi lebih mudah. Jika yang diinginkan adalah mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, maka sektor dengan kontribusi terbesar yang sebaiknya menjadi sasaran program prioritas, sedangkan jika yang diinginkan adalah pemerataan kue ekonomi yang lebih berimbang atau disparitas pendapatan yang kecil maka sektor yang harus menjadi sasaran program prioritas adalah sektor yang memiliki kontribusi cukup rendah tetapi mampu menyerap tenaga kerja yang banyak.

Kabupaten Badung dengan karakteristik industri pariwisata sebagai leading sector, menjadikan Badung berbasiskan perekonomian yang bertumpu pada sektor tersier (jasa-jasa). Selama kurun waktu empat tahun terakhir (tahun 2010-2014), struktur perekonomian Kabupaten Badung tidak banyak mengalami perubahan yang signifikan.

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator penting dalam mengukur kemajuan perekonomian suatu wilayah adalah laju pertumbuhan ekonomi. Menurut teori ekonomi klasik, pertumbuhan ekonomi merupakan indikator terpenting dalam pembangunan ekonomi. Walaupun teori tersebut sudah bergeser, yakni pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta mengindikasikan kesejahteraan di wilayah tersebut, tetapi indikator ini masih tidak dapat diabaikan sebagai tolok ukur kinerja pembangunan. Karena pertumbuhan ekonomi yang dalam hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan, secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan produksi yang terjadi di suatu wilayah.

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan besarnya perubahan produksi yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi secara riil (sudah menghilangkan efek harga). Sehingga terlihat jelas peningkatan produksi dari setiap sektor ekonomi. Dalam publikasi ini menggunakan tahun dasar 2000.

Pada Tahun 2014 perekonomian kabupaten Badung mengalami percepatan, yaitu mencapai 6,97 persen, relatif lebih tinggi dari pertumbuhan Propinsi Bali yang mencapai 6,72 persen. Kabupaten Badung merupakan salah satu kabupaten yang menarik pertumbuhan ekonomi Propinsi Bali keatas selain Kota Denpasar, Kabuapten Buleleng dan Kabupaten Gianyar

Tidak seperti daerah-daerah lainnya di bali yang lapangan usahanya ada yang mengalami kontraksi, seluruh lapangan usaha yang ada di Kabupaten Badung Tahun 2014 mengalami pertumbuhan, walaupun ada juga yang mengalami perlambatan. _____

Dilihat dari PDRB per kapita, Kabupaten Badung tetap menjadi kabupaten yang memiliki PDRB per kapita tertinggi se-Bali. Sedangkan PDRB per kapita terendah diduduki oleh Kabupaten Karangasem yaitu sebesar Rp. 14,43 juta. Walaupun PDRB Kota Denpasar menduduki peringkat kedua se-Bali, tetapi PDRB per kapita Kota Denpasar masih berada di bawah Kabupaten Gianyar bahkan Kabupaten Klungkung. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk di Kota Denpasar lebih tinggi jika dibandingkan jumlah penduduk di kedua kabupaten tersebut.

2.2. Kebijakan Keuangan

Dalam penyusunan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2015 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, beberapa arah dan kebijakan keuangan yang ditempuh antara lain:

1) Arah dan kebijakan umum bagian pendapatan

Kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan Pendapatan Daerah yaitu :

- a) Sumber-sumber pendapatan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan tetap dipertahankan serta diperluas dan diintensifkan pemungutan
- b) Pengelolaan PAD diarahkan dengan melakukan intensifikasi pajak dan retribusi daerah dengan fokus tetap peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- c) Mengoptimalkan peran Perusahaan Daerah / Badan Usaha Milik Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.
- d) Pengelolaan keuangan daerah yang mengarah pada asas efisien dan efektivitas.
- e) Mendayagunakan aset-aset daerah yang potensial menjadi sumber pendapatan daerah.
- f) Pembangunan prasarana dan sarana yang secara langsung dapat mendukung upaya peningkatan pendapatan daerah.
- g) Meningkatkan profesionalisme, transparansi dan obyektifitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Strategi dan prioritas pendapatan daerah yang dilaksanakan melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang pendapatan daerah diwujudkan melalui tindakan sebagai

- a) Menerapkan sistem pendataan yang sistematis, kuantitatif dan formatif, untuk dapat memberi bahan-bahan yang akurat dan obyektif dalam menentukan potensi pajak.
- b) Menerapkan mekanisme pembayaran pajak secara transparan, mudah dan cepat melalui pelayanan antar jemput atau melalui bendahara khusus penerima.
- c) Memberikan diklat pemeriksaan pembukuan sesuai standard akuntansi Indonesia serta pelatihan teknologi komputerisasi/sistem informasi management pajak daerah.
- d) Melaksanakan sosialisasi produk hukum pada masyarakat melalui media cetak dan elektronik untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan membayar pajak.
- e) Penyempurnaan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah yang berwujud Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan juklak lainnya.
- f) Peningkatan koordinasi dengan SKPD terkait sebagai upaya memaksimalkan potensi penggalan sumber-sumber PAD.

2) Arah dan kebijakan umum bagian belanja

Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hasil tersebut bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan Belanja Daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya.

Arah dan Kebijakan Umum Belanja Daerah Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- a) Belanja Daerah diprioritaskan Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.
- b) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan serta pembangunan infrastruktur.
- c) Belanja Daerah yang dianggarkan juga untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing SKPD di Jajaran Pemerintah Kabupaten Badung

Upaya-upaya yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Badung terkait dengan belanja daerah adalah sebagai berikut :

- a) Menerapkan analisis yang mendalam untuk mengetahui struktur, komponen, dan besarnya biaya dari setiap kegiatan baik yang lama maupun yang baru.
- b) Melakukan koordinasi lebih intensif dengan pemerintah pusat

Permasalahan dan tantangan utama yang dihadapi pada Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2014, sehingga mengakibatkan perlu diadakan perubahan terhadap Belanja Daerah adalah sebagai berikut :

- a) Sejalan dengan perkembangan ekonomi dan pesatnya laju pembangunan antar sektor dan wilayah, maka kebutuhan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Badung setiap tahun mengalami peningkatan. Prasarana jalan menjadi kebutuhan prioritas masyarakat hampir diseluruh Kecamatan. Mensinergikan antara pengembangan infrastruktur dengan pengembangan wilayah dan pelestarian lingkungan, menjadi masalah dan tantangan yang perlu mendapat prioritas penanganan. Beberapa infrastruktur utama yang menjadi kebutuhan mutlak yakni jalan, irigasi, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi.
- b) Masih adanya penduduk miskin yang diakibatkan oleh adanya perbedaan kapasitas sumber daya manusia (SDM), sosial budaya dan sosial ekonomi masih merupakan tantangan dalam pelaksanaan pembangunan nasional pada umumnya maupun pembangunan daerah Kabupaten Badung pada khususnya. Berbagai usaha yang dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan selama ini ternyata masih sangat rentan terhadap perubahan sosial ekonomi maupun bencana alam.
- c) Pembangunan pertanian dan pemenuhan kebutuhan pangan dihadapkan pada permasalahan yang sifatnya alami, sosial, dan ekonomi. Produksi pertanian tanaman pangan masih sangat dipengaruhi oleh situasi iklim, ketersediaan air irigasi dan serangan hama dan penyakit yang sulit diprediksi. Disamping itu, pertumbuhan ekonomi luar pertanian yang demikian pesat menimbulkan permasalahan kompetisi penggunaan sumber-sumber atau faktor produksi.
- d) Jumlah penduduk yang padat terutama di perkotaan akan membawa dampak pada terjadinya kerawanan sosial dan pengangguran meningkat. Sedangkan dari aspek sosial lainnya seperti pendidikan dan kesehatan masih perlu ditingkatkan kualitasnya, demikian juga dalam penanganan ketertiban dan ketentraman daerah.
- e) Struktur perekonomian daerah Kabupaten Badung dominan dipengaruhi oleh sektor pariwisata, sehingga bila terjadi gangguan terhadap sektor ini maka mempengaruhi tingkat kemajuan ekonomi daerah.

3) **Arah dan kebijakan umum bagian pembiayaan**

Arah dan Kebijakan Umum Pembiayaan, berkaitan dengan penggunaan Sisa Lebih Tahun Sebelumnya untuk mengantisipasi kebutuhan dana pada tahun berikutnya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Badung senantiasa melaksanakan langkah-langkah efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, dengan tidak mengesampingkan sasaran dan target yang telah ditetapkan.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1 Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program/kegiatan dan kinerja APBD

Pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2010-2015.

Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator – indikator kinerja yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010-2015 yang memiliki focus stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas internal organisasi tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama .

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Badung yang akan digunakan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 64 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung , sebagai berikut :

Pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2010-2015.

Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator – indikator kinerja yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010-2015 yang memiliki focus stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas internal organisasi tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama .

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Badung yang akan digunakan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 64 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung , sebagai berikut :

1. Tujuan Meningkatkan pelaksanaan Srada dan Bhakti
Sasaran Terwujudnya kerukunan kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kabupaten Badung
Indikator jumlah Konflik sara

2. Tujuan Meningkatkan pelestarian Adat dan Budaya Bali.
Sasaran Terciptanya kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Badung yang dinamis, dilandasi oleh Adat dan Budaya Bali yang harmonis, seimbang dan selaras
Indikator Persentase desa adat yang memenuhi tatanan yang ditetapkan (lestari)
Persentase sekaa teruna yang memenuhi tatanan yang ditetapkan (lestari)

3. Tujuan Terwujudnya tuntas wajib Belajar 12 tahun.
 Sasaran Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah.
 Indikator Persentase anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar 12 tahun
 Angka Melek Huruf

4. Tujuan Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang kompetitif di pasar kerja serta meningkatkan kualitas pendidikan untuk dapat melanjutkan ke jenjang pend
 Sasaran Terciptanya kualitas lulusan pendidikan dasar dan menengah yang mampu diterima di jenjang yang lebih lanjut/tinggi
 Indikator Persentase lulusan pendidikan yang diterima di jenjang menengah

5. Tujuan Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Di Kabupaten Badung.
 Sasaran Meningkatkan status kesehatan ibu, bayi dan balita

 Terciptanya sistem pelayanan kesehatan yang prima dan terstandarisasi, mulai tingkat puskesmas, rumah sakit, dan unit layanan kesehatan lainnya dengan biaya pel
 Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
 Indikator Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup
 Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup
 Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup
 Cakupan pelayanan puskesmas dengan standar ISO
 Cakupan pelayanan Rumah Sakit dengan standar terakreditasi
 Cakupan kemandirian posyandu purnama dan mandiri
 Cakupan desa siaga aktif
 Cakupan Perilaku hidup bersih dan sehat tingkat rumah tangga

6. Tujuan Terwujudnya penataan sistem administrasi kependudukan yang tertib dan terpadu.
 Sasaran Terwujudnya sistem data kependudukan di seluruh Kabupaten Badung yang tertib dan terpadu.
 Terpenuhinya pelayanan Keluarga Berencana yang prima bagi seluruh lapisan masyarakat menuju keluarga kecil bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Badung
 Indikator Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun
 Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan: Prosentase keluarga yang memiliki KK, Prosentase penduduk yang emiliki KTP, Prosentase kepemilikan akte kelahiran, Prosentase penduduk yang dilengkapi dengan akte kematian

7. Tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diimbangi dengan pemerataan sehingga dapat dinikmati secara luas oleh masyarakat terutama oleh masyarakat miskin, cacat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.
 Sasaran Mempermudah, memperlancar dan memperluas akses masyarakat miskin maupun cacat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya dalam memanfaatkan sumberdaya ekonomi secara adil dan terbuka.
 Indikator Persentase penurunan penyandang masalah sosial
8. Tujuan Meningkatnya usaha kecil dan menengah yang mampu bersaing dan menunjang ekonomi kerakyatan.
 Sasaran Meningkatnya pertumbuhan sektor UKM dan koperasi dalam sistem perekonomian masyarakat Badung
 Indikator Persentase koperasi sehat dan berkualitas
 Persentase peningkatan nilai ekspor UKM
9. Tujuan Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan
 Sasaran Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produksi hasil komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan
 Meningkatnya kuantitas produksi hasil komoditi peternakan, perikanan dan kelautan
 Indikator Jumlah produksi hasil komoditi pertanian, perkebunan, kehutanan
 Tingkat produktivitas bahan pangan utama (padi)
 Jumlah populasi peternakan
 Jumlah produksi perikanan dan kelautan
10. Tujuan Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
 Sasaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
 Indikator Meningkatnya Pelayanan dalam Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban
 Persentase laporan mengenai gangguan ketentraman dan ketertiban yang direspon dalam kurun waktu kurang dari 1 hari setelah laporan diterima
11. Tujuan Terjaminnya terwujudnya good government and clean government.
 Sasaran Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang berbasis kinerja dan tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu.
 Terwujudnya pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel
 Indikator Opini Pemeriksaan BPK
 Peningkatan pendapatan asli daerah
 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

12. Tujuan Terwujudnya pembangunan yang selaras dan seimbang antar wilayah.
 Sasaran Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten.
 Indikator Perencanaan tata ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten
 Prosentase Jaringan irigasi berkondisi baik
13. Tujuan Terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan pola dan fungsi wilayah.
 Sasaran Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku pembanguann lainnya untuk membangun sesuai dengan rencana tata ruang
 Indikator Prosentase lahan terbangun sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung
 Prosentase sarana prasarana Bangunan gedung pemerintah yang representatif

2.3.2 Hasil perhitungan pencapaian kinerja program/ kegiatan dan pelaksanaan APBD berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Badung tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan Antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2015 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Badung tahun 2015 berdasarkan hasil pengukurannya dan target kinerja dalam 5 (lima) tahun yang ingin dicapai dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi awal	Kondisi akhir yg ingin dicapai	Capaian Kinerja Sampai Tahun 2015	Target/satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4			5		
1.	Terwujudnya kerukunan kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kabupaten Badung	1. Jumlah konflik SARA	0	0	100%	0	0	100%

2.	Terciptanya kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Badung yang dinamis, dilandasi oleh Adat dan Budaya Bali yang harmonis, seimbang dan selaras	1.	Persentase desa adat yang memenuhi tatanan yang ditetapkan (lestari)	28 PEMBINAAN	16,39% (20 ds adat)	100	3,27 (4)	3,27 (4)	100%
		2.	Persentase sekaa teruna yang memenuhi tatanan yang ditetapkan (lestari)	28 PEMBINAAN	3,68% (20 sekaa teruna)	100	0,73 (4)	0,73 (4)	100%
3.	Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah.	3.	Persentase anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar 12 tahun	100	100	100	100	100	100
		4.	Angka Melek Huruf	100	100	95.71	100	100	100
4.	Terciptanya kualitas lulusan pendidikan dasar dan menengah yang mampu diterima di jenjang yang lebih lanjut/tinggi.	5.	Persentase lulusan pendidikan yang diterima di jenjang menengah	100	100	100	100	100	100
5.	Meningkatnya status kesehatan ibu, bayi dan balita	6.	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	62.16	99.83	33,62	60/ 100.000	99.83	33.62
		7.	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	6.71	3.87	114	4,5/ 1.000	3.87	114
		8.	Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup	5.1	3.62	127.60	5/ 1.000	3.62	127.60

6.	Terciptanya sistem pelayanan kesehatan yang prima dan terstandarisasi, mulai tingkat puskesmas, rumah sakit, dan unit layanan kesehatan lainnya dengan biaya pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat KabupatenBadung.	1. Cakupan pelayanan puskesmas dengan standar ISO	0	46.15	102.56	45	46.15
		2. Cakupan pelayanan Rumah Sakit dengan standar terakreditasi	100	100	100	100	100
7.	Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	3. Cakupan kemandirian posyandu purnama dan mandiri	0	97.74	102.88	95	97.74
		4. Cakupan desa siaga aktif	100	100	100	100	100
		5. Cakupan Perilaku hidup bersih dan sehat tingkat rumah tangga	50	80.18	114.54	70	80.18
8.	Terwujudnya sistem data kependudukan di seluruh Kabupaten Badung yang tertib dan terpadu.	6. Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan: 1. Prosentase keluarga yang memiliki KK	0	100	100	100	100
		2. Prosentase penduduk yang memiliki KTP	99.27	100	90.02	100	90.02
		3. Prosentase kepemilikan akta kelahiran	155.87	105.25	105.25	95	99.99
		4. Prosentase penduduk meninggal yang dilengkapi dengan akta kematian	0	100	115.39	100	115.39

9.	Terpenuhinya pelayanan Keluarga Berencana yang prima bagi seluruh lapisan masyarakat menuju keluarga kecil bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Badung	1. Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	0.13	0.12	100	0.12	0.12	100
10.	Mempermudah, memperlancar dan memperluas akses masyarakat miskin maupun cacat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya dalam memanfaatkan sumberdaya ekonomi secara adil dan terbuka.	2. Persentase penurunan penyandang masalah sosial	13.294 rts	8.968	100	67.46%	67.46%	100
11.	Meningkatnya pertumbuhan sektor UKM dan koperasi dalam sistem perekonomian masyarakat Badung	3. Persentase koperasi sehat dan berkualitas	(88 koperasi)	100 % (332 Koperasi)	107.8	21.68 (72 Koperasi)	30.10 (100 Koperasi)	100 %
		4. Persentase peningkatan nilai ekspor UKM	106.017.497,01	590.140.152,66	62.39	120.152.926,503	51.860.534,16	138.8%
12.	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produksi hasil komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan	5. Jumlah produksi hasil komoditi pertanian, perkebunan, kehutanan	180.923	873.446	101.7	174.450	177.004	111.71 %
		6. Tingkat produktivitas bahan pangan utama (padi)	63.93 Kw/Ha	63,18 Kw/Ha	98.71	64 Kw/Ha	63.18 Kw/Ha	99.07%
13.	Meningkatnya kuantitas produksi hasil komoditi peternakan, perikanan dan kelautan	7. Jumlah populasi peternakan	1.590.789	1.486.081	102.54	1.450.000	1.486.081	102.54
		8. Jumlah produksi perikanan dan kelautan	1.607.998	149.766,9	94.51	5.061,87	7.097,59	133.56
14.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban	9. Jumlah pelanggaran keamanan dan	1764	3158	100	2.500	3158	73.68

15.	Meningkatnya Pelayanan dalam Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban	1.	Persentase laporan mengenai gangguan ketentraman dan ketertiban yang direspon dalam kurun waktu kurang dari 1 hari setelah laporan diterima	25%	67.92%	100	65%	67.92%	104.49
16.	Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang berbasis kinerja dan tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu.	2.	Opini Pemeriksaan BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%
		3.	Peningkatan pendapatan asli daerah	936.887.975.37	2.990.965.598	129	2.302.169.811	2.990.965.598	129%
17.	Terwujudnya pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel	4.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	35.72	75.89	108.41	70	75.89	108.41 %
18.	Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten.	5.	Perencanaan tata ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten	1	28	28	3	4	133.33 %
		6.	Prosentase Jaringan irigasi berkondisi baik	89.14	94.56	100.04 %	94.68	94.56	100.04 %

19.	Meningkatnya	1.	Prosentase	45.82	65.01	108,34	60	65.01	108.35 %
-----	--------------	----	------------	-------	-------	--------	----	-------	----------

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2015

	kesadaran masyarakat dan pelaku pembanguann lainnya untuk membangun sesuai dengan rencana tata ruang	lahan terbangun sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung							%
		2. Prosentase sarana prasarana gedung pemerintah yang representatif	14.23	46.14	107,31	43	46.14	107.31 %	
20.	Terwujudnya percepatan pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan yang seimbang, Berkelanjutan dan sinergisitas keterpaduan kebijakan dan program pembangunan akan ditempuh melalui strategis pembangunan yang seimbang antar wilayah.	1. Tingkat kepadatan lalu lintas (V/C ratio)	31	0,64	98,3%	0.60	0,64	98.3%	
		2. Prosentase persimpangan yang terpasang traffic light	56,86	80,39	102,5%	78.43	80,39	102.5 %	
21	Meningkatnya kualitas pelestarian lingkungan hidup di seluruh wilayah Kabupaten Badung menuju Badung yang bersih dan hijau.	3. Persentase sumberdaya air yang memenuhi baku mutu air:	10.2	26.74	26.74	50	26,74	146,5 %	
		• COD air sungai							
		• BOD air sungai	5.2	6.1	6.1	6	6,1	98,3%	
		• BOD air laut	6.03	9.31	9.31	10	9.31		
		4. Persentase sumberdaya udara yang dipantau yang memenuhi standar baku mutu	42.1	23.48	23.48	400	23.48	194,13 %	
		5. Persentase perusahaan yang dibina yang menggunakan pengolahan limbah	35	80	80	80	80	100%	

2.3.3 Penjelasan tercapai dan hambatan tidak tercapainya kinerja program/ kegiatan dan pelaksanaan APBD

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015 dan pelaksanaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan berupa Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2015, serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil. Pemerintah Kabupaten Badung bersama segenap komponen masyarakat telah berupaya mencapai 14 tujuan, 21 sasaran dan 37 indikator kinerja sasaran tersebut.

Adapun analisis terhadap capaian dari masing-masing tujuan yang penjabaran melalualiat ukur sasaran dan indikator kinerja sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tujuan 1 Yang ingin dicapai yaitu meningkatnya srada dan bhakti dalam kurun waktu 5 (lima) tahun tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan. Dimana srada yang dimaksud tersebut adalah merupakankeyakinan/ kepercayaan sebagai cikal bakal dari penguatan beragama. Menurunnya keyakinan atau kepercayaan akan agama yang dianut maka akan terjadi kerapuhan akan inti sari dari ajaran agama yang dianut. Untuk itu pentingnya menjaga kemurnian atas ajaran agama tersebut. Bhakti dalam kehidupan sehari-hari sering kita dengar dan sering memakainya sesuai dengan tujuannya. Secara etimologi kata bhakti diartikan tunduk dan hormat atau perbuatan yang menyatakan setia. Pengertian bhakti disini analog dengan takwa, sedangkan sradha analog dengan iman, sehingga istilah iman dan takwa (imtag) dalam bahasa yang sudah populer dalam agama Hindu disebut Sradha –Bhakti. Dan sangat disadari sungguh sulit untuk mengukurnya. Ketercapaian Tujuan 1 diukur dengan dua indikator yaitu Peningkatan jumlah pelaksanaan Srada dan Peningkatan/ Jumlah pelaksanaan Bhakti. Dimana keberhasilan indikator ini akan menggambarkan keberhasilan dari Tujuan 1. Namun srada dan bhakti yang dimaksud adalah sebatas pengukuran terhadap kerukunan kehidupan beragama dan bermasyarakat di kabupaten Badung.

Tujuan 2 Meningkatkan Pelestarian Adat dan Budaya Bali

Tujuan pembangunan ke 2 (dua) yang ingin dicapai adalah meningkatnya pelestarian adat dan budaya bali. Dimana Desa adat merupakan suatu kesatuan wilayah dimana para warganya secara bersama-sama mengkonsepsikan dan mengaktifkan upacara keagamaan untuk memelihara kesucian desa. Rasa kesatuan sebagai warga desa adat terikat oleh karena adanya karang desa (wilayah desa), awig-awig desa (sistem aturan desa dengan peraturan pelaksanaannya), dan adanya pura kahyangan tiga.

Berdasarkan kriteria yang ada, desa adat di kabupaten Badung pada dasarnya sudah memenuhi tatanan yang ditetapkan atau lestari sesuai dengan adat dan istiadat pada desa adat itu sendiri. Adanya pembinaan kepada 20 desa adat adalah untuk mempertahankan kelestarian desa adat itu sendiri agar tidak punah. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan setiap tahunnya sampai pada akhirnya seluruh desa adat yang ada mendapatkan pembinaan untuk meningkatkan kualitas desa adat itu sendiri agar tetap ajeg dan lestari

Dengan adanya regenerasi pada sekaa teruna maka akan terus adanya perubahan dan untuk dapat melestarikan dan mempertahankan sekaa teruna yang ada pada di Kabupaten Badung, maka di pandang perlu untuk dilakukannya pembinaan secara rutin kepada sekaa teruna yang ada pada Kabupaten Badung. Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung untuk mewujudkan capaian kinerja tersebut diatas adalah dengan ikut berperan aktif dalam menjaga dan mempertahankan kelestarian sekaa teruna di Kabupaten Badung dengan melaksanakan pembinaan-pembinaan terhadap Sekaa Teruna melalui melalui Program Pengembangan Nilai Budaya dengan total pagu anggaran selama 5 (lima) tahun yang mendukung kegiatan sasaran kedua pada Indikator Sasaran 2 adalah sebesar Rp.3.095.601.900

Pemerintah Kabupaten Badung tahun 2011 sampai dengan 2015

Sehingga pertahun ditargetkan untuk melakukan pembinaan sebanyak 4 Sekaa Teruna di Kabupaten Badung. Bila dilihat perkembangan dari tahun 2011 sampai dengan 2015 pembinaan sudah dilaksanakan kepada 20 Sekaa Teruna dari 20 Sekaa Teruna yang ditargetkan sampai dengan tahun ke-5 renstra atau pada target yang ditetapkan didalam RPJMD Kabupaten Badung tahun 2011-2015 . Presentase capaian kinerja sampai dengan tahun 2015 dapat dikatakan sudah terealisasi 100% dari target yang ditetapkan yaitu 100 %. Bila dilihat dari jumlah Sekaa Teruna yang terdapat di Kabupaten Badung yaitu berjumlah 543 Sekaa Teruna maka dapat dikatakan bahwa baru 3,68 % terealisasi terhadap peningkatan dalam melestarikan Sekaa Teruna tersebut.

Tujuan 3 Terwujudnya tuntas wajib belajar 12 tahun

Terwujudnya tuntas wajib belajar 12 tahun merupakan tujuan dari pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Badung, dan mendukung program pemerintah dalam mewujudkan generasi emas indonesia tahun 2045. Pemerintah Kabupaten Badung telah melaksanakan program meningkatkan pemerataan kesempatan belajar bagi masyarakat dan meningkatkan mutu pendidikan pada semua jenjang, jalur dan jenis pendidikan. Agar kualitas penduduk dapat ditingkatkan, maka upaya-upaya perbaikan di bidang pendidikan baik secara kuantitas maupun kualitasnya, merupakan hal yang wajar untuk dilakukan. Untuk mencapainya diperlukan upaya, upaya-upaya tersebut dilakukan karena pendidikan merupakan salah satu usaha yang sangat strategis untuk menyeimbangkan seluruh potensi peserta didik agar mampu menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni , berakhlak mulia, berbudi pekerti lihur serta memiliki kesehatan jasmani dan rohani. Jika program wajib belajar ini diterapkan dengan sukses, maka penduduk muda Kabupaten Badung akan mendapat manfaat dari peningkatan akses pendidikan. Anak-anak ini membawa peluang yang sangat besar, ketika mereka bergerak menuju pasar tenaga kerja.

Apabila dilihat capaian indikator kinerja tahun 2014 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 117,89%, sehingga capaian kinerja sudah mencapai target yang telah ditetapkan, apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2013 sebesar 117,73% , terjadi peningkatan sebesar 0,16% di tahun 2014. Peningkatan ini terjadi karena terdapat siswa yang berusia diluar usia resmi sekolah dari luar Kabupaten yang ingin bersekolah di Kabupaten Badung,hal ini sebagai wujud pengakuan dan kepercayaan dari masyarakat terhadap kualitas pendidikan di Kabupaten Badung yang sangat berkomitmen menangani kualitas pendidikan . Apabila dilihat perkembangan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, ternyata pada tahun 2012 anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar mengalami penurunan karena pada tahun tersebut siswa putus sekolah berjumlah 26 orang atau 0,03% dari target yang ditetapkan, kemudian pada tahun 2013 dan 2014 mengalami peningkatan kembali karena tidak ada siswa putus sekolah dan terdapat siswa yang berusia di luar usia resmi sekolah dari luar Kabupaten Badung.Dibandingkan dengan Propinsi Bali persentase anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar 12 mencapai 104,93%.

Program yang mendukung terwujudnya pelaksanaan indikator persentase anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar 12 tahun antara lain program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dengan total pagu anggaran sampai akhir RPJMD adalah sebesar Rp.124.827.150.814,00 serta program pendidikan menengah dengan anggaran sebesar Rp.14.822.486.515,00. Pemerintah Kabupaten Badung terus mengupayakan dan mendukung masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang layak, sehingga konsekuensinya biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pula melalui program dan kegiatan inovasi seperti dana pendampingan BOS dari APBD. Sejak tahun 2005 Kabupaten Badung mengalokasikan anggaran pendamping dana BOS untuk tingkat SD dan SMP sedangkan tingkat SMA /SMK mulai dilaksanakan pada tahun 2010.

Tujuan 4 Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang kompetitif di pasar kerja serta meningkatkan kualitas pendidikan untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Dalam paradigma di era baru ini, kualitas SDM, penguasaan teknologi tinggi dan peningkatan peran masyarakat mendapat perhatian utama. Paradigma pembangunan yang berorientasi pada keunggulan komparatif dengan lebih mengandalkan sumber daya alam dan tenaga kerja yang murah, saat ini mulai mengalami pergeseran menuju pembangunan yang lebih menekankan keunggulan kompetitif. Memasuki era globalisasi sekarang pemerintah ingin mewujudkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang kompetitif di pasar kerja serta meningkatkan kualitas pendidikan untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pengukuran kinerja tersebut baru terbatas pada prosentase lulusan pendidikan yang diterima di jenjang menengah, dan pengukuran keberhasilan atau kegagalan melalui indikator tujuan Persentase lulusan pendidikan yang diterima di jenjang menengah yang telah tertuang melalui 1 (satu) alat ukur sasaran yaitu terciptanya kualitas lulusan pendidikan dasar dan menengah yang mampu diterima di jenjang yang lebih lanjut/tinggi dan 1 (satu) indikator sasaran yaitu persentase lulusan pendidikan yang diterima di jenjang menengah. Secara umum dapat disampaikan bahwa tujuan terhadap terwujudnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang kompetitif di pasar kerja serta meningkatkan kualitas pendidikan untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sudah tercapai 100%. Tercapainya tujuan tersebut karena peran pemerintah kabupaten yang sangat peduli terhadap pendidikan dengan memberikan anggaran yang cukup besar dan diupayakan kedepannya akan terus ditingkatkan. Dengan demikian apa yang diharapkan oleh masyarakat bisa terwujud dan akan diprogramkan rencana 5 tahun kedepan

Keberhasilan pembangunan terutama ditentukan oleh kualitas manusia, bukan semata-mata oleh melimpah kekayaan alam. Dalam hal pengembangan SDM, pendidikan memiliki nilai strategis dan mempunyai peran penting sebagai suatu investasi di masa depan. Secara teoritis, pendidikan adalah dasar dari pertumbuhan ekonomi, dasar dari perkembangan sains dan teknologi, mengurangi kemiskinan serta ketimpangan dalam pendapatan. Saat ini dituntut kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang kompetitif dan berani bersaing. Dalam pengukuran sasaran ini dimaksudkan untuk mengukur dan mengetahui jumlah siswa tamatan SMP yang melanjutkan ke jenjang pendidikan Sekolah Menengah (SM). Penjabaran dari sasaran tersebut diukur melalui 1 (satu) alat ukur indikator kinerja prosentase lulusan pendidikan yang diterima di jenjang menengah.

Target 2014 yang ditetapkan sebesar 100% dengan realisasinya sebesar 97,99%, tahun 2013 target yang ditetapkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 98,44, tahun 2012 target yang ditetapkan sebesar 100% dengan realisasi 95,85%, sedangkan tahun 2011 target yang ditetapkan sebesar 100% dengan realisasi 100%, sesungguhnya capaian kinerja yang tidak mencapai target bukan berarti tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi akan tetapi siswa tamatan SMP tersebut melanjutkan ke luar daerah. Capaian kinerja ini apabila dibandingkan dengan Kota Denpasar capaian kinerja lulusan pendidikan yang diterima di jenjang menengah sebesar 119.9%. Program yang mendukung capaian indikator ini adalah program pendidikan menengah dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 11.015.129.665,00

Tujuan 5 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Badung

Kesehatan sebagai hak asasi manusia secara tegas di amanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Di dunia Internasional, konstitusi Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) tahun 1948 juga menyatakan bahwa Health is a fundamental right, yang mengandung suatu kewajiban untuk menyetujui yang sakit dan mempertahankan serta meningkatkan yang sehat. Hal ini melandasi pemikiran bahwa sehat sebagai hak asasi manusia dan sehat sebagai investasi.

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Derajat kesehatan merupakan salah satu ukuran kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. Sebagaimana lazimnya untuk menggambarkan derajat kesehatan digunakan indikator kualitas utama seperti angka kematian, kesakitan, kelahiran, status gizi dan lain-lain.

Pengukuran terhadap capaian tujuan kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung tahun 2010 -2015 yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Badung diukur dengan tiga indikator tujuan yaitu Angka Kesakitan, Angka Kematian dan Persentase Balita Gisi Buruk yang kemudian dijabarkan ke dalam tiga indikator sasaran yaitu indikator yaitu Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA).

Capaian kinerja untuk tujuan 5 yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Badung yang diukur dengan tiga indikator dengan rata-rata kinerja sebesar 108,26%, berarti tujuan meningkatnya derajat kesehatan di Kabupaten Badung telah tercapai

Tujuan 6 Terwujudnya penataan sistem administrasi kependudukan yang tertib dan terpadu

Kepadatan penduduk dalam suatu wilayah sangat penting untuk diketahui karena merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam merencanakan pembangunan. Semakin padat suatu wilayah maka akan semakin tinggi perhatian yang diperlukan dalam penyusunan suatu kebijakan pembangunan. Kabupaten Badung merupakan daerah heterogen multi etnis yang dipengaruhi oleh migrasi penduduk dari berbagai daerah di Indonesia serta wisatawan manca negara yang mampu membaaur dalam satu kesatuan kehidupan sosial budaya (Socio Culture) dengan tetap menjaga keharmonisan dan keselarasan. Apabila tidak terkendali dapat menjadi peluang munculnya berbagai permasalahan sosial seperti tuntutan penyediaan lapangan kerja, pengangguran, kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Oleh karena itu saat ini dan masa yang akan datang kondisi tersebut merupakan tantangan sekaligus tugas berat bagi Pemerintah Kabupaten Badung.

Berkenaan dengan kondisi tersebut sehingga pemerintah Kabupaten Badung menata penduduknya melalui tujuan yang tertuang dalam RPJMD tahun 2010 – 2015 yaitu Terwujudnya penataan sistem administrasi kependudukan yang tertib dan terpadu. Untuk dapat mengetahui ketercapaian tujuan tersebut diukur melalui indikator tujuan cakupan layanan administrasi kependudukan yang kemudian dijabarkan melalui 2 (dua) sasaran yaitu 1 terwujudnya sistem data kependudukan di seluruh kabupaten badung yang tertib dan terpadu, dengan indikator sasaran cakupan layanan administrasi kependudukan meliputi : prosentase keluarga yang memiliki KK, prosentase penduduk yang memiliki KTP, prosentase kepemilikan akte kelahiran dan prosentase penduduk meninggal yang dilengkapi dengan akte kematian dan sasaran 2 terpenuhinya pelayanan keluarga berencana yang prima bagi seluruh lapisan masyarakat menuju keluarga kecil bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat kabupaten badung dengan indikator sasaran adalah cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun.

Pemerintah Kabupaten Badung secara umum dapat disampaikan sudah/belum mampu untuk mewujudkan Tujuan Terwujudnya penataan sistem administrasi kependudukan yang tertib dan terpadu. Dimana kondisi awal kependudukan di kabupaten badung adalah masih terasa relatif rendahnya kesadaran penduduk untuk melengkapi dirinya dengan administrasi/dokumen kependudukan, sehingga tingkat kepemilikan dokumennya relatif rendah dan diharapkan dalam lima tahun kedepan adalah tertibnya administrasi kependudukan dan Penduduk yang tertib administrasi atau capaian kinerja sudah tercapai 100%.

Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 terlihat bahwa adanya peningkatan capaian realisasi 0,13% turun menjadi 0,12 %. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal karena adanya Komunikasi Informasi dan Edukasi, tentang kesehatan reproduksi remaja kepada remaja melalui beberapa kegiatan seperti Ajang Kreativitas, Pendirian PIK KRR di tingkat sekolah, sosialisasi yang melibatkan tokoh – tokoh masyarakat maupuntokoh agama. Semakin kecil angka kawin pertama usia kurang dari 20 tahun semakin baik, artinya perkawinan dini berhasil ditekan. Dan bila dibandingkan dengan perkembangan setiap tahunnya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 menunjukkan bahwa capaian kinerja mengalami peningkatan . Program yang mendukung terhadap keberhasilan ini adalah program keluarga berencana dengan pagu anggaran tahun 2015 Rp. 40.785.600,00 dan akumulasi pagu program dari tahun 2011-2015 sebesar Rp. 827.196.505

Tujuan 7 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diimbangi dengan pemerataan sehingga dapat dinikmati secara luas oleh masyarakat terutama oleh masyarakat miskin, cacat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.

Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang terus-menerus menuju perbaikan di segala bidang kehidupan masyarakat dengan berdasarkan seperangkat nilai yang dianut yang menuntun masyarakat untuk mencapai tingkat kehidupan yang didambakan. Kabupaten Badung merupakan daerah pusat Pariwisata sekaligus merupakan pusat aktivitas perekonomian dan daerah tujuan para urban. Pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, ditandai dengan pembangunan pemukiman, pusat-pusat pembelanjaan, perkantoran, perhotelan, tempat hiburan, akan membawa dampak sosial baik yang bersifat positif maupun negatif. Kesenjangan sosial yang semakin nyata merupakan dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang kurang memperhatikan aspek pemerataan. Ketimpangan pembangunan cenderung mengakibatkan ketimpangan dalam kesejahteraan masyarakat karena kesejahteraan merupakan fungsi dari investasi yang dilakukan, semakin tinggi tingkat investasi semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan ini selanjutnya menumbuhkan iklim yang mendorong peran aktif masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masalah-masalah sosial. Kemiskinan dan keterbelakangan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk masalah yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat karena masih kurang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yang berdampak munculnya permasalahan sosial dengan demikian kemiskinan dan keterbelakangan tersebut harus diupayakan pemecahan masalahnya secara terencana, terintegrasi dan menyeluruh.

Bertitik tolak pada hal tersebut sehingga Pemerintah Kabupaten Badung berupaya untuk mengurangi kesenjangan tersebut dengan mencantumkan tujuan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang tertuang pada RPJMD tahun 2011 – 2015 yaitu ingin Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diimbangi dengan pemerataan sehingga dapat dinikmati secara luas oleh masyarakat terutama oleh masyarakat miskin, cacat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya dimana keberhasilan terhadap capaian tujuan ini diukur dengan indikator tujuan Persentasepenurunan penyandang masalah sosialyang dituangkan dalam sasaran yaitu : Mempermudah, memperlancar dan memperluas akses masyarakat miskin maupun cacat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya dalam memanfaatkan sumberdaya ekonomi secara adil dan terbuka yang dijabarkan melalui 1 (satu) indikator

Terhadap tujuan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diimbangi dengan pemerataan sehingga dapat dinikmati secara luas oleh masyarakat terutama oleh masyarakat miskin, cacat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya secara umum dapat disampaikan bahwa sudah berhasil tetapi sebatas pada pengukuran rumah tangga miskin atau rumah tangga yang tidak memiliki ketidakberdayaan ekonomi yang sekarang disebut RTS atau rumah tangga sasaran. Bisa dikatakan tercapai tujuan tersebut terbukti dari pencapaian sasaran melalui indikator kinerja sasaran dalam 5 (lima) sudah mencapai target 100 sesuai dengan rencana yang ditetapkan pada RPJMD 2010-2015.

Jumlah RTS di Kabupaten Badung di awal Tahun 2011 sebanyak 13.294 dimana pada Tahun 2011 ditargetkan menyasar 1000 RTS sehingga menjadi 12.294 RTS pada tahun 2012 turun menjadi 11.168, pada tahun 2013 turun menjadi 10.168 RTS, pada tahun 2014 turun menjadi 9.568, di tahun 2015 RTS ditargetkan turun menjadi 8.968 dan sudah terealisasi sesuai rencana. Hal ini disebabkan karena tingginya komitmen untuk mengentaskan kemiskinan. Melalui pemberian bantuan usaha ekonomi produktif yang disalurkan langsung kepada keluarga rumah tangga sasaran supaya bisa dimanfaatkan sebagai modal awal dalam merintis usaha secara mandiri, melaksanakan pembinaan dan memberikan bantuan bibit ternak pada kelompok usaha bersama (KUBE) fakir miskin. Program yang mendukung terhadap keberhasilan indikator kinerja ini antara lain : program pemberdayaan fakir miskin komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dari program pembinaan panti asuhan/panti jompo dengan total pagu anggaran selama 5 Tahun (2011-2015) sebesar RP. 5.462.885.400,- yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Badung. Untuk lebih jelasnya perkembangan capaian kinerja setiap tahun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 201

Tujuan 8 Meningkatnya usaha kecil dan menengah yang mampu bersaing dan menunjang ekonomi kerakyatan

Sejalan dengan kebijakan makro pemerintah pusat tentang "Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan" sebagai isu sentral di mana Koperasi dan UKM sebagai pilarnya mendapat posisi yang sangat strategis untuk dibangun dan dikembangkan sebagai sektor real yang andal dalam membangun perekonomian nasional dan daerah. Sektor real ini cukup teruji dalam keadaan perekonomian bangsa yang dililit oleh krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan sektor ini masih tetap eksis dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian daerah. Sebagai wadah kegiatan bersama bagi produsen maupun konsumen, koperasi diharapkan mampu dan berperan dalam meningkatkan posisi tawar dan efisiensi ekonomi rakyat, dan sekaligus turut memperbaiki kondisi persaingan usaha pasar melalui dampak eksternalitas positif yang ditimbulkan. Sementara itu UKM berperan dalam memperluas penyediaan lapangan kerja, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan peningkatan pendapatan.

Berlandaskan pada keinginan pemerintah kabupaten badung untuk menunjang ekonomi kerakyatan sehingga salah satu tujuan pemerintah daerah kabupaten badung adalah meningkatnya usaha kecil dan menengah yang mampu bersaing dan menunjang ekonomi kerakyatan dengan indikator tujuan Jumlah pertumbuhan UKM di Kabupaten Badung serta indikator Persentase peningkatan nilai ekspor UKM yang dijabarkan melalui alat ukur sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor UKM dan koperasi dalam sistem perekonomian masyarakat badung dengan 2 indikator sasaran persentase koperasi sehat dan berkualitas dan indikator sasaran persentase peningkatan nilai ekspor UKM

Secara umum dapat disampaikan bahwa tujuan meningkatnya usaha kecil dan menengah yang mampu bersaing dan menunjang ekonomi kerakyatan belum tercapai. Belum tercapainya tujuan tersebut karena salah satu dari indikator yaitu persentase peningkatan nilai ekspor UKM tidak tercapai dari target yang ditetapkan dan baru tercapai sebesar 62.39%. Tidak tercapainya tujuan ini karena krisis global, pelaku usaha belum menemukan daerah tujuan baru yang potensial, adanya kewajiban sertifikasi kayu untuk produk bahan dasar kayu dan kurangnya daya saing produk.

Apabila dilihat perkembangan capaian kinerja dalam setiap tahunnya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 terlihat adanya perkembangan yang cukup bagus karena telah tercapainya target kinerja yang ditetapkan. Tercapainya capaian kinerja ini didukung oleh program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dengan pagu anggaran Rp.414.039.600 di tahun 2015 dan realisasi sebesar 378.580.240. Sedangkan pagu anggaran selama lima tahun sebesar Rp. 966.220.700. dan realisasi sebesar Rp.

901.346.590. Bila dibandingkan dengan Kota Denpasar jumlah koperasi sehat berkualitas dimana kota Denpasar melaksanakan penilaian terhadap 160 koperasi, sebanyak 146 (91.25%) kategori sehat dan 14 (8.75%) kategori kurang sehat, Kabupaten Badung melaksanakan penilaian terhadap 100 koperasi dengan kategori 100 (100%) koperasi sehat.

Indikator kinerja Persentase peningkatan nilai ekspor UKM ini didukung oleh program efisiensi perdagangan dalam negeri dengan pagu anggaran di tahun 2015 sebesar Rp. 1.034.762.100 dengan realisasi sebesar Rp.867.595.132 Sedangkan pagu anggaran selama lima tahun sebesar Rp. 3.561.436.250. dan realisasi sebesar Rp. 3.072.141.552

Tujuan 9 Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan

Pertanian dalam arti luas didalamnya mencakup sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan. Pembangunan pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional maupun regional, yakni sebagai penghasil bahan pangan pokok, penyedia bahan baku industri, penyedia lapangan pekerjaan, untuk pelestarian sumber daya alam dan nilai-nilai sosial budaya serta lingkungan hidup. Walaupun kecenderungan generasi muda yang mau menekuni pekerjaan sektor pertanian sudah menurun, nampaknya tetap harus diakui bahwa pembangunan pertanian dalam arti luas memiliki peranan yang sangat penting dan strategis antara lain untuk menciptakan ketahanan/ketersediaan pangan, memberikan sumbangan /kontribusi terhadap PDRB, dan sebagai penyedia lapangan kerja. Pembangunan sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan di Kabupaten Badung, disamping untuk memenuhi produksi dan tingkat konsumsi masyarakat, juga diharapkan mendukung kawasan hijau, kawasan konservasi, dan kawasan resapan air yang sangat berguna bagi kawasan di bagian hilirnya.

Berlandaskan tersebut diatas sehingga Pemerintah Kabupaten Badung ingin mewujudkannya melalui sebuah tujuan yaitu Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan dengan indikator tujuan yaitu peningkatan produksi pertanian, perkebunan, peningkatan produktivitas bahan pangan utama pangan serta dua indikator peningkatan populasi ternak, peningkatan produksi perikanan dan kelautan yang dijabarkan melalui 2 (dua) alat ukur sasaran yaitu sasaran 1. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produksi hasil komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan dan sasaran 2. Meningkatnya kuantitas produksi hasil komoditi peternakan, perikanan dan kelautan.

Saat ini perkembangan pembangunan pertanian sudah mulai adanya pergeseran yakni dari hanya sekedar menghasilkan produksi semata, mulai memperhatikan sisi bisnis (agrobisnis) dan nilai tambah yang mungkin bisa diharapkan dari usaha tani yang masih ditekuni oleh sebagian besar masyarakat di Kabupaten Badung. Dengan demikian sudah seyogyanya untuk meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi hasil komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan. Sehingga masyarakat di Kabupaten Badung dapat menunjang pendapatan untuk kesejahteraan keluarganya.

Tahun 2015, capaian kinerja terhadap indikator sasaran jumlah produksi hasil komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan dari target yang ditetapkan sebesar 174.450 ton dan terealisasi sebesar 177.004 ton sehingga capaian kinerja tercapai 108,83 %. Produksi tersebut ditopang oleh produksi dari padi sebanyak 106.181 ton, kemudian dilanjutkan dengan produksi Hortikultura sebanyak 54.935 ton dan produksi tanaman Palawija 14.791 ton. Untuk produksi perkebunan sebesar 1097 ton, sehingga total produksi mencapai 177.004 ton. Tercapainya capaian kinerja ini karena perbaikan pola dan metode tanam legowo 2 : 1 (metode pengaturan kolom, dalam satu kelompok setiap barisan berjarak 20 cm dan antar kolom berjarak 40 cm), subsidi pupuk dan pendampingan tenaga lapangan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung. Namun bila dibandingkan dengan produksi tahun 2014 terjadi penurunan di tahun 2015, diakibatkan karena musim kemarau yang berkepanjangan di tahun 2015, Tahun 2014 menetapkan target sebesar 174.370 Ton dan terealisasi sebesar 194.930 Ton sehingga capaian kinerja tercapai 111,71%.

Bila dibandingkan dengan perkembangan setiap tahunnya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 produksinya cukup fluktuatif namun masih dapat memenuhi

target tahunan dengan trend meningkat.

Program kegiatan Tahun 2015 yang mendukung indikator tersebut adalah Program Ketahanan Pangan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 24.726.137.650. Dan program kegiatan untuk mendukung pencapaian target tersebut mencapai total pagu anggaran selama 5 (lima) tahun Rp,74.684.784.034

Tujuan 10 Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat merupakan kewajiban Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat merupakan wujud dari Hak Asasi Manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan adanya desentralisasi, maka kewajiban penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat tersebut juga menjadi kewajiban dari Pemerintah Daerah dalam rangka melindungi keamanan dan kenyamanan masyarakatnya. Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan tulang punggung penjaga ketentraman dan ketertiban untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya sebagai bagian dari perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Badung. Cakupan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum.

Dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, penyelenggaraan roda pemerintahan daerah perlu didukung kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatannya dengan aman. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung telah melaksanakan pengukuran terhadap jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban di Kabupaten Badung, dimana merupakan salah satu indikator kinerja sasaran yang menggambarkan tingkat ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Badung dengan target dan capaian kinerja yang telah ditetapkan dari Tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Melihat keanekaragaman penduduk serta banyaknya eksodus yang akan melakukan bisnis di Kabupaten Badung, dari tahun 2011 sampai tahun 2015 telah memperkirakan potensi terjadinya pelanggaran dan ketertiban dimana pada tahun 2011 sebanyak 2000 pelanggaran, 2012 sebanyak 2100 pelanggaran, 2013 sebanyak 2300 pelanggaran dan tahun 2014 sebanyak 2400 serta 2015 sebanyak 2500 pelanggaran dengan capaian dan realisasi sesuai dengan diagram diatas. Secara menyeluruh tingkat pelanggaran keamanan dan ketertiban di Kabupaten Badung meningkat dari yang telah ditetapkan. Bukan berarti satuan polisi pamong praja tidak maksimal melaksanakan tugasnya melainkan karena diakibatkan semakin meningkatnya tingkat investasi di kabupaten badung dimana para pengusaha atau perusahaan yang melaksanakan usahanya tidak berpedoman pada PERDA yang berlaku. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dengan cara lebih mengoptimalkan petugas patroli untuk melakukan penindakan terhadap semua pelanggaran keamanan dan ketertiban umum serta menindaklanjuti semua laporan, pengaduan dan perintah khusus untuk melakukan penindakan terhadap masyarakat dan badan hukum yang melanggar Perda dan Peraturan Kepala Daerah.

Dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban serta untuk mengantisipasi berbagai perkembangan baru dan potensi ancaman yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, Pemerintah Kabupaten Badung sesungguhnya telah melakukan berbagai upaya. Pada batas-batas tertentu, upaya yang telah dilakukan boleh dikatakan telah memperlihatkan hasil yang signifikan. Potensi gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat hingga kini dapat dieliminasi dan dicegah untuk tidak keburu membesar. Salah satu upaya yang dilaksanakan adalah merespon dengan cepat setiap laporan mengenai gangguan ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Badung. Dimana keberhasilan dan kegagalan terhadap indikator Kinerja Sasaran Persentase laporan mengenai gangguan ketentraman dan ketertiban yang direspon dalam kurun waktu kurang dari 1 hari setelah laporan diterima dilaksanakan dengan menetapkan target-target yang telah ditetapkan selama lima tahun dari Tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 yaitu pada tahun 2011 ditargetkan sebesar 30%, tahun 2012 ditargetkan sebesar 40%, di tahun 2013 ditargetkan sebesar 50%, tahun 2014 ditargetkan 60 % dan di tahun 2015 sebesar 65%.

Tujuan 11 Terjaminnya terwujudnya good government and clean government.

Good and Clean Government merupakan pemerintah yang taat azas, tidak ada penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang serta efisien, efektif, hemat dan bebas KKN. Tujuan akhir dari Good and clean government adalah terwujudnya Good Governance. Good Governance pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Kata ‘baik’ disini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Good Governance. Agar “good governance” dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Good governance yang efektif menuntut adanya “alignement” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep “good governance” dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Namun pemerintah kabupaten berusaha menghadapi tantangan tersebut dengan mengangkat tujuan terjaminnya terwujudnya good government and clean government yang dijabarkan melalui alat ukur sasaran 1. Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang berbasis kinerja dan tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu dengan 2 indikator kinerja , sasaran 2. Terwujudnya pelaksanaan kebijakan norma standar, standar prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusa pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel dengan 1 indikator kinerja.

Secara umum dapat disampaikan bahwa terhadap tujuan 11. yaitu terjaminnya terwujudnya good government and clean government dapat dikatakan sudah tercapai optimal sesuai dengan rencana yang ditetapkan pada RPJMD tahun 2010-2015 yakni terbukti dari tercapainya masing-masing alat ukur pada masing-masing indikator opini pemeriksaan BPK memperoleh WTP , peningkatan pendapatan capaian kinerja tercapai 100% dan bahkan ada peningkatan dari target yang ditetapkan serta nilai akuntabilitas tercapai 100 % dan terjadi peningkatan 5,89% dari target yang ditetapkan sebesar 70 dan terealisasi sebesar 75,89.

Tujuan 12 Terwujudnya pembangunan yang selaras dan seimbang antar wilayah.

Pembangunan bagi sebuah Pemerintahan Daerah merupakan suatu keharusan dan hal yang sangat esensial dalam rangka mencapai tujuan utama dari keberadaan sebuah Pemerintahan Daerah yang otonom yaitu bagaimana mewujudkan kebahagiaan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dalam konteks indonesia, tujuan dari dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa indonesia dari seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilaksanakanlah sejumlah program pembangunan yang terpadu dan merata diseluruh daerah Indonesia

Keberhasilan dari pembangunan tersebut salah satunya akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan yang benar dan sesuai dengan kondisi lokal serta dalam mengembangkan perangkat kelembagaan yang akan menjadi infrastruktur utama dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Dalam konteks pelaksanaan Otonomi Daerah saat ini memberikan kewenangan lebih besar kepada Daerah dalam mengatur dan melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri, maka keberhasilan pembangunan akan sangat ditentukan oleh kemampuan dari Pemerintah Daerah dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan yang benar dan sesuai dengan kondisi daerahnya serta dalam mengembangkan perangkat kelembagaan yang dapat mendukung pelaksanaan pembangunan di Daerahnya masing-masing

Pembangunan pada sektor pertanian dan pariwisata yang diarahkan pada upaya mendukung penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat di bidang Pekerjaan Umum yaitu: penyediaan sumber daya air baku untuk kebutuhan masyarakat, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan permukiman termasuk sanitasi lingkungan dan persampahan, peningkatan jaringan dan luas jalan baik berupa aksesibilitas, mobilitas, keselamatan, kondisi jalan, maupun kecepatan. Disamping itu juga diarahkan untuk mendukung upaya penataan bangunan dan lingkungan melalui penertiban izin pendirian bangunan dan penyediaan pedoman harga satuan gedung negara di daerah. Dibidang jasa konstruksi diarahkan pada pelayanan penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan penyediaan sistem informasi jasa konstruksi yang terkoneksi secara nasional.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa tujuan terwujudnya pembangunan yang selaras dan seimbang antar wilayah dapat dikatakan sudah tercapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan pada RPJMD tahun 2010-2015. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah dokumen perencanaan tata ruang pada kawasan strategis yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung. Target jumlah dokumen perencanaan Tahun 2015 RPJMD sebanyak 3 dokumen, sedangkan capaian realisasi Tahun 2015 mencapai 4 dokumen (capaian 133,3%). Tahun 2014 capaian realisasi mencapai 100% sesuai dengan target RPJMD sebanyak 9 dokumen. Sedangkan untuk tahun 2011-2013 belum mencapai target RPJMD mengingat Perda RTRW Kabupaten Badung yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sampai tahun 2013 belum ditetapkan, sehingga penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis yang merupakan penjabaran dari RTRW Kabupaten belum dapat disusun sesuai target RPJMD

Tujuan 13 Terwujudnya pembangunan yang selaras dan seimbang antar wilayah.

Pembangunan bagi sebuah Pemerintahan Daerah merupakan suatu keharusan dan hal yang sangat esensial dalam rangka mencapai tujuan utama dari keberadaan sebuah Pemerintahan Daerah yang otonom yaitu bagaimana mewujudkan kebahagiaan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dalam konteks Indonesia, tujuan dari dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dari seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilaksanakanlah sejumlah program pembangunan yang terpadu dan merata diseluruh daerah Indonesia

Keberhasilan dari pembangunan tersebut salah satunya akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan yang benar dan sesuai dengan kondisi lokal serta dalam mengembangkan perangkat kelembagaan yang akan menjadi infrastruktur utama dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Dalam konteks pelaksanaan Otonomi Daerah saat ini memberikan kewenangan lebih besar kepada Daerah dalam mengatur dan melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri, maka keberhasilan pembangunan akan sangat ditentukan oleh kemampuan dari Pemerintah Daerah dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan yang benar dan sesuai dengan kondisi daerahnya serta dalam mengembangkan perangkat kelembagaan yang dapat mendukung pelaksanaan pembangunan di Daerahnya masing-masing.

Berlatar belakang tersebut sehingga Pemerintah Kabupaten Badung ingin mewujudkan pembangunan yang selaras dan seimbang antar wilayah. Program Kabupaten Badung dalam Membangun Wilayahnya dengan Konsep “Tiga Pilar Pembangunan/ Tri hita Karana.” Kondisi ini telah mendorong untuk bersikap berhati-hati dan bijaksana dalam merencanakan pengembangan wilayahnya.

Masing-masing wilayah memiliki perbedaan karakteristik fisik lingkungan yang mencolok dan saling memiliki keterikatan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain sehingga adanya kesesuaian terhadap rencana tata ruang yang sesuai dengan peruntukan wilayah karena Kabupaten Badung merupakan salah satu daerah kunjungan pariwisata dunia yang dipandang perlu untuk menyeimbangkan antara pembangunan sektor Pertanian yang merupakan pendukung sektor pariwisata serta merupakan sektor andalan dan menjadi lokomotif pembangunan ekonomi di Kabupaten Badung

Pembangunan pada sektor pertanian dan pariwisata yang diarahkan pada upaya mendukung penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat di bidang Pekerjaan Umum yaitu: penyediaan sumber daya air baku untuk kebutuhan masyarakat, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan permukiman termasuk sanitasi lingkungan dan persampahan, peningkatan jaringan dan luas jalan baik berupa aksesibilitas, mobilitas, keselamatan, kondisi jalan, maupun kecepatan. Disamping itu juga diarahkan untuk mendukung upaya penataan bangunan dan lingkungan melalui penertiban izin pendirian bangunan dan penyediaan pedoman harga satuan gedung negara di daerah. Dibidang jasa konstruksi diarahkan pada pelayanan penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan penyediaan sistem informasi jasa konstruksi yang terkoneksi secara nasional.

Pelayanan dibidang penataan ruang diarahkan pada upaya mendorong tersedianya informasi rencana tata ruang wilayah, terlaksananya pelibatan peran serta masyarakat terhadap proses penyusunan tata ruang, terlayannya izin pemanfaatan ruang, terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran dibidang tata ruang serta tersedianya ruang terbuka hijau.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa tujuan terwujudnya pembangunan yang selaras dan seimbang antar wilayah dapat dikatakan sudah tercapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan pada RPJMD tahun 2010-2015. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah dokumen perencanaan tata ruang pada kawasan strategis yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung. Target jumlah dokumen perencanaan Tahun 2015 RPJMD sebanyak 3 dokumen, sedangkan capaian realisasi Tahun 2015 mencapai 4 dokumen (capaian 133,3%). Tahun 2014 capaian realisasi mencapai 100% sesuai dengan target RPJMD sebanyak 9 dokumen. Sedangkan untuk tahun 2011-2013 belum mencapai target RPJMD mengingat Perda RTRW Kabupaten Badung yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sampai tahun 2013 belum ditetapkan, sehingga penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis yang merupakan penjabaran dari RTRW Kabupaten belum dapat disusun sesuai target RPJMD

sesuai realisasi akumulasi sampai tahun 2015 dibandingkan dengan target pada akhir masa RPJMD di tahun 2015 bahwa untuk indikator perencanaan tata ruang kawasan strategi sesuai RTRW Kabupaten dan Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik, semua indikator tersebut sudah mencapai target yang ditetapkan dan telah terpenuhi di tahun 2015, hal ini dapat terwujud karena telah terlaksananya program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan lainnya serta partisipasi berbagai pihak dalam pelaksanaan pembangunan khususnya dalam bidang pengairan maupun rencana tata ruang pembangunan strategis Kabupaten Badung sebagai pengendali pemanfaatan ruang.

Tujuan 14 Terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan pola dan fungsi wilayah.

Perkembangan pembangunan yang sangat pesat membawa perubahan yang cepat, dinamis dan berdampak terhadap lingkungan serta penataan ruang secara keseluruhan. Hal yang paling sulit dalam penataan ruang adalah pengendalian ruang, dimana pihak Pemerintah khususnya perijinan harus lebih menitikberatkan pada aspek peningkatan pemanfaatan ruang sehingga tujuan mewujudkan ruang wilayah/ kota/ kawasan yang nyaman, produktif dan berkelanjutan dapat tercapai. Dinamika penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Badung memiliki kompleksitas yang cukup tinggi terutama pembangunan fasilitas penunjang kepariwisataan. Untuk itu dibutuhkan keterpaduan, integrasi dan koordinasi antara penyelenggara penataan ruang pada berbagai tingkat kewenangan.

Dalam rangka terwujudnya tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Badung, maka perlu kiranya dibentuk lembaga yang memiliki peran yang sangat strategis sesuai dengan permendagri 50 tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang daerah. Dalam hal ini di Kabupaten Badung Sudah dibentuk BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) yang terdiri dari beberapa unsur SKPD sebagai wadah untuk berkoordinasi dan berwenang dalam mengontrol pengendalian pemanfaatan ruang.

pembangunan yang sesuai dengan pola dan fungsi wilayahnya disasar melalui manajemen penataan ruang yang efektif, guna meningkatkan percepatan pembangunan di wilayah pertumbuhan, terkendalinya pertumbuhan wilayah perkotaan, pemanfaatan tanah yang efisien dan efektif, akan ditempuh melalui strategi peningkatan pembangunan infrastruktur berdasarkan RTRW Kabupaten Badung.

Berbagai strategi dan upaya dilakukan untuk memudahkan identifikasi pemanfaatan ruang yang terjadi sehingga dapat segera diamati perubahan penggunaan lahan secara langsung. Strategi tersebut dilaksanakan dengan kebijakan : meningkatkan pembangunan infrastruktur di semua wilayah sesuai dengan potensi wilayah masing-masing.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut diukur dengan indikator tujuan persentase lahan terbangun sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung yang dijabarkan ke dalam sasaran hanya diukur melalui alat ukur sasaran meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku lainnya untuk membangun sesuai dengan rencana ruang dan 2 (dua) indikator sasaran yaitu perencanaan tata ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten dan prosentase jaringan irigasi ber kondisi baik

Secara umum dapat disampaikan bahwa tujuan Terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan pola dan fungsi wilayah sudah terwujud, hal ini terbukti dari hasil kinerja masing-masing alat ukur sudah tercapai 100% sesuai dengan rencana pada RPJMD tahun 2010-2015.

Tujuan 15 Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup dan meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini sudah sepatutnya diantisipasi dan ditangani dengan langkah dan upaya yang baik supaya lingkungan hidup akan selalu terjaga dan terlindungi di kemudian hari. Pasalnya, kerusakan lingkungan hidup yang saat ini terjadi tak lepas dari ulah dan kebiasaan manusia sehingga tanggung jawab yang benar perlu ditanamkan dalam diri setiap masyarakat. Dengan berupaya untuk melestarikan lingkungan hidup secara maksimal oleh semua pihak dan lapisan masyarakat, maka keseimbangan lingkungan hidup yang berjalan akan terus terlaksana dengan optimal

Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemimpin negara saja, melainkan tanggung jawab setiap insan di bumi, dari balita sampai manula. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sekecil apa pun usaha yang kita lakukan sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak.

Upaya Pemerintah Kabupaten Badung untuk mewujudkan tujuan pelestarian lingkungan hidup dan meningkatnya kualitas lingkungan hidup demi kemakmuran bagi rakyatnya tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan ditindaklanjuti dengan menetapkan sasaran Meningkatnya kualitas pelestarian lingkungan hidup di seluruh wilayah kabupaten badung menuju badung yang bersih dan hijau dengan didukung oleh program pembangunan berkelanjutan yang sering disebut sebagai pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah usaha meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memerhatikan faktor lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan dikenal dengan nama Pembangunan Berkelanjutan

Meningkatnya kualitas pelestarian lingkungan hidup di seluruh wilayah Kabupaten Badung menuju Badung yang bersih dan hijau diukur menggunakan beberapa indikator kinerja yang menggambarkan pelestarian lingkungan hidup dan meningkatnya kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Badung dimana telah ditetapkan target kinerja serta capaian yang ingin dicapai pada akhir periode RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010-2015

Pemerintah Kabupaten Badung terus mengupayakan adanya keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup. Saat ini, banyak kegiatan atau usaha yang berhadapan dengan masalah lingkungan karena tuntutan dari masyarakat. Dengan pertambahan jumlah penduduk mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas manusia, dengan demikian potensi kebutuhan terhadap air juga semakin meningkat. Penggunaan air yang utama adalah sebagai kebutuhan air minum. Sumber air yang digunakan sebagai kebutuhan manusia sehari-hari adalah berasal dari air tanah, mata air dan sungai. Meningkatnya kebutuhan dan aktivitas manusia berpengaruh terhadap kualitas sumber air tersebut. Selanjutnya, kualitas ketiga sumber air tersebut akan berpengaruh pula pada kualitas air laut sebagai lokasi hilir atau daerah tempat mengalirnya air terakhir

Dengan pertambahan penduduk yang terjadi di Kabupaten Badung berdampak pada kualitas air karena semakin meningkatnya aktivitas manusia yang menyebabkan penurunan kualitas air. Penurunan kualitas air akan berdampak pada beberapa aspek kehidupan manusia dan sekitarnya seperti aspek kesehatan dan kelangkaan air. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelestarian lingkungan hidup di seluruh wilayah Kabupaten Badung menuju Badung yang bersih dan hijau diperlukan adanya pemantauan dan penelitian mengenai kualitas air di Kabupaten Badung.

Program yang mendukung terhadap keberhasilan ini adalah program Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan Pembinaan kinerja perusahaan dalam penataan lingkungan (PKP2L), yang didukung dana sebesar Rp.20.065.950, dengan realisasi anggaran Rp. 19.190.950 (95.64%). Apabila dilihat perkembangan capaian kinerja setiap tahunnya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 terus melampaui target setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena semakin efektifnya pembinaan terhadap pelaku usaha.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD tahun anggaran 2015 dan perbandingan dengan realisasi tahun anggaran 2014

Tabel : 3.1.
PERBANDINGAN REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN 2015 DAN 2014

No		Anggaran setelah Perubahan	Realisasi (Rp)	
			Tahun 2015	Tahun 2014
A.	PENDAPATAN			
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA	2.832.034.079.488,77	3.001.464.263.013,83	2.722.625.562.620,69
2	Pendapatan Transfer - LRA	719.891.860.750,63	658.368.937.920,96	666.810.980.390,22
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LRA	75.808.600.000,00	75.296.364.406,00	70.549.472.556,00
	Jumlah Pendapatan	3.627.734.540.239,40	3.735.129.565.340,79	3.459.986.015.566,91
B.	BELANJA			
1	Belanja Operasi	2.228.543.022.946,50	1.827.038.690.486,17	1.785.722.656.111,24
2	Belanja Modal	1.107.969.352.809,78	922.772.328.343,62	949.069.337.245,29
3	Belanja Tak Terduga	3.000.000.000,00	-	203.145.290,00
4	Belanja Bagi Hasil - Transfer	712.059.135.668,62	696.823.295.739,89	541.168.971.170,66
	Jumlah Belanja	4.051.571.511.424,90	3.446.634.314.569,68	3.276.164.109.817,19
	Surplus/Defisit	(423.836.971.185,50)	288.495.250.771,11	183.821.905.749,72
C.	PEMBIAYAAN			
1	Penerimaan Pembiayaan	918.023.891.278,96	925.326.073.071,08	893.884.086.627,24
2	Pengeluaran Pembiayaan	300.000.000.000,00	300.000.000.000,00	154.000.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan Netto	618.023.891.278,96	625.326.073.071,08	739.884.086.627,24
	SILPA	194.186.920.093,46	913.821.323.842,19	923.705.992.376,96

Pada bagian pendapatan terjadi pelampauan sebesar Rp107.395.025.101,39 dari target yang ditetapkan yaitu dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp3.627.734.540.239,40 dan terealisasi sebesar Rp3.735.129.565.340,79 atau 5,2%

Capaian bagian pendapatan sebesar 105,2% persen terinci untuk masing-masing komponen pendapatan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp2.832.034.079.488,77 terealisasi sebesar Rp3.001.464.263.013,83 atau 105,98%
- b. Pendapatan Transfer, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp719.891.860.750,63 terealisasi sebesar Rp658.368.937.920,96 atau 91,47%
- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp75.808.600.000,00 terealisasi sebesar Rp75.296.364.406,00 atau 37465,3%

Belanja Tak Terduga, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp3.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0%

Belanja Transfer/Bagi Hasil ke Desa, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp712.059.135.668,62 terealisasi sebesar Rp696.823.295.739,89 atau 99,5%

Capaian bagian pembiayaan netto sebesar -47,91% terinci untuk penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai berikut:

- a. Jumlah penerimaan pembiayaan dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp923.705.992.376,96, terealisasi sebesar Rp1.164.462.560,00 atau 0,13%
- b. Jumlah pengeluaran pembiayaan dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp300.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp300.000.000.000,00 atau 100%

Dibandingkan dengan realisasi APBD tahun 2014, realisasi pendapatan 2015 mengalami kenaikan Rp780.765.280.839,59 yaitu dari Rp2.954.662.970.615,80 pada tahun 2014, menjadi Rp3.735.428.251.455,39 pada tahun 2015 atau sebesar 26,42%.

Sementara itu, dari pembiayaan netto di tahun 2015 terealisasi -Rp298.835.537.440,00 sedangkan tahun sebelumnya terealisasi Rp688.998.736.991,32, meningkat sebesar -Rp987.834.274.431,32 atau sebesar -143,37%.

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Hambatan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja keuangan, khususnya di bidang pendapatan tahun 2015 tidak ada, karena pendapatan daerah telah melampaui target yang telah ditetapkan, namun tetap harus ditingkatkan faktor kemampuan, disiplin, rasa tanggung jawab dan dedikasi terhadap pelaksanaan tugas dari SDM yang ada sehingga apa yang ditetapkan dalam target pendapatan dapat dicapai maksimal.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dan penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan Akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

4.1 Entitas Pelaporan

Informasi Keuangan disajikan dalam laporan keuangan suatu organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Satuan organisasi jika di pemerintah daerah disebut juga SKPD dan mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan dapat disebut dengan entitas. Entitas yang menyusun laporan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

- a. pada masing-masing SKPD sesuai dengan tanggungjawabnya. Laporan Keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan, yang selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD

No	SKPD	ALAMAT/NO.TELP
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga	Pusat Pemerinthan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali Telp. 0361-9009267
2	Dinas Kesehatan	Pusat Pemerinthan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali Telp. 0361-9009421
3	RSUD	Jl. Raya Kapal, Mengwi Badung Telp. 0361-9006812
4	Dinas Bina Marga dan Pengairan	Pusat Pemerinthan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali Telp.0361-9009399
5	Dinas Cipta Karya	Pusat Pemerinthan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali Telp.0361-9009398
6	Dinas pemadam Kebarakan	Jl. Kebo Iwa No. 39 Denpasar Telp.0361-428449

No	SKPD	ALAMAT/NO.TELP
7	Badan Perencanaan Pembangunan daerah, Peneliti dan Pengembangan	Pusat Pemerinthan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali Telp. 0361-9009243
8	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	Pusat Pemerinthan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali Telp. 0361-9009243
9	Dinas Kebersihan dan pertamanan	Pusat Pemerinthan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali Telp. 0361-9009264
10	Badan Lingkungan Hidup	Pusat Pemerinthan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali Telp. 0361-9009264
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Pusat Pemerinthan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali Telp. 0361-9009264
12	Kantor Pemberdayaan Perempuan	Pusat Pemerinthan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali Telp. 0361-9009393
13	Badan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera	Pusat Pemerinthan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali Telp. 0361-9009423
14	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	Pusat Pemerinthan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali Telp. 0361-9009415
15	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Pusat Pemerinthan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali Telp. 0361-9009404
16	Dinas Kebudayaan	Pusat Pemerinthan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali Telp. 0361-9009392
17	Satuan Polisi Pamong Praja	Pusat Pemerinthan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali Telp. 0361-9009250

No	SKPD	ALAMAT/NO.TELP
18	Badan kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan	Pusat Pemerinthan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali Telp. 0361-9009253
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pusat Pemerinthan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali Telp. 0361-9009253
20	Sekretariat Daerah	Pusat Pemerinthan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali Telp. 0361-9009307
21	Sekretarian Daerah Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD)	Pusat Pemerinthan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali Telp. 0361-9009313
22	Inspektorat	Pusat Pemerinthan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali Telp. 0361-9009246
23	Dinas Pendapatan /Pesedahan Agung	Pusat Pemerinthan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali Telp. 0361-410370
24	Kecamatan Kuta	Jl. Blambangan Kuta Badung Telp. 0361-767542
25	Kecamatan Kuta Utara	Jl. Bedugul No. 2 Kerobokan Telp. 0361-418741
26	Kecamatan Kuta Selatan	Jl. Kampus Unud Jimbaran Telp. 0361704670
27	Kecamatan Mengwi	Jl. Rama No 1 Mengwi Telp. 0631 812945
28	Kecamatan Abiansemal	Jl. Ciung Wanara Blahkiuh Telp 06318944696
29	Kecamatan Petang	Desa Petang, Kecamatan Petang Badung Telp. 0361 813555
30	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Badung	Pusat Pemerinthan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali Telp. 0361-9009241

No	SKPD	ALAMAT/NO.TELP
31	Kelurahan kuta	JL. Blambangan, Kuta, Badung 0361
32	Kelurahan Legian	JL. Padma Timur, Kuta, Badung 0361
33	Keluruhan Seminyak	JL. Seminyak, Kuta, Badung 0361
34	Keluruhan Tuban	JL. Raya Uluwatu, Kuta, Badung 0361
35	Kelurahan Kedonganan	JL. Blambangan, Kuta, Badung 0361
36	Kelurahan Kerobokan	JL. Raya Kesambi 0361
37	Kelurahan Kerobokan Kaja	JL. Beluran 0361
38	Kelurahan Kerobokan kelod	JL. Umalas Kauh 0361
39	Kelurahan Benoa	JL. Baypass Nusa Dua 0361
40	Kelurahan Tanjung Benoa	JL. Tanjung Benoa 0361
41	Kelurahan Jimbaran	JL. Raya Uluwutu 0361
42	Kelurahan Sempidi	Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali 0361
43	Kelurahan Lukluk	JL. Raya Lukluk 0361
44	Kelurahan Kapal	Jl. Raya Kapal, Mengwi Badung 0361
45	Kelurahan Abianbase	JL. Astina Selatan 0361
46	Kelurahan Sading	JL. 0361

No	SKPD	ALAMAT/NO.TELP
47	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa	Pusat Pemerinthan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali Telp. 0361-9009257
48	Kantor Arsip Daerah	Pusat Pemerinthan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali Telp. 0361-4715228
49	Kantor Perpustakaan Daerah	Pusat Pemerinthan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali Telp. 0361-4715223
50	Dinas Pertanian, Perkebunan dan kehutanan	Pusat Pemerinthan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali Telp. 0361-9009411
51	Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan	Pusat Pemerinthan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali Telp. 0361-9009141
52	Dinas Pariwisata	Pusat Pemerinthan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali Telp. 0361-9009272
53	Badan Perijinan	Pusat Pemerinthan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan laporan keuangan

Dalam menyusun laporan keuangan pemerintah kota mengacu pada delapan prinsip, kedelapan prinsip tersebut yaitu:

- a. Basis Akuntansi
- b. Prinsip Nilai Historis
- c. Prinsip Realisasi
- d. Prinsip Subtansi Mengungguli Bentuk Normal
- e. Prinsip Periodisasi
- f. Prinsip Konsistensi
- g. Prinsip Pengungkapan Lengkap
- h. Prinsip Penyajian Wajar

Dari delapan prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. **Basis Akuntansi**

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung adalah Basis Akruwal untuk pengakuan pada laporan, neraca, Operasional, Perubahan Ekuitas, Basis Akruwal adalah pendapatan, beban dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas diterima/dibayar oleh kas daerah.

Basis akruwal tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca.

Basis akruwal mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA disusun berdasarkan basis kas. Artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Basis akruwal untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

b. **Nilai Historis (historical cost)**

Pemerintah Kota Semarang menerapkan nilai historis karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait. Aset Pemerintah Kota Semarang dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

- c. **Realisasi (realization)**
Anggaran pemerintah selama suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Pemerintah Kota Semarang masih diwajibkan menyusun LRA, maka pendapatan atau belanja kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah kas atau mengurangi.
- d. **Substansi Mengungguli Bentuk Formal (Substance over form)**
Penyajian laporan diupayakan dengan wajar yaitu dimana transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
- e. **Periodisitas (periodicity)**
Laporan keuangan Pemerintah Kota Semarang dibagi menjadi periode-periode pelaporan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, triwulanan, dan semesteran. Bulanan untuk laporan pendapatan, triwulan untuk Laporan LRA dan penjabarannya, semester untuk LRA, Laporan Operasional, Neraca, Arus Kas (PPKD), tahunan untuk LRA, Laporan Operasional, Neraca, Perubahan Ekuitas, Perubahan Saldo Anggaran lebih dan Arus Kas (PPKD) dan CALK
- f. **Konsistensi (consistency)**
Konsistensi adalah perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode keperiode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain, selama dapat memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2012 tidak ada perubahan metode akuntansi.

4.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung. Pengukuran pada masing-masing pos laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung sebagai berikut:

KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

KAS DAN SETARA KAS

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk kegiatan pemerintah.

Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara penerimaan, kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Sebagai contoh, suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang terhitung sejak tanggal perolehan investasi, misalnya deposito berjangka waktu kurang kurang dari 3(tiga), dan investasi yang dicairkan sewaktu-waktu tanpa biaya signifikan.

Setiap entitas pemerintah wajib menyajikan saldo kasnya pada saat diminta menyusun neraca awal.

Kas juga meliputi seluruh Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca awal termasuk kwitansi pembelian barang dan penyerahan uang muka yang belum dipertanggungjawabkan sebagai belanja hingga tanggal neraca awal.

Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas, serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek misalnya 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Kas yang sudah diterima oleh bank operasional, yaitu bank yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai bank penerima atau pengeluaran, merupakan bagian dari kas umum daerah.

Kas di Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Mangupura antara lain terdiri dari Kas di Rekening 009.01.02.00011.1 atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Badung. Rincian Kas di Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Mangupura tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Kas dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat tanggal neraca.

Saldo kas pemerintah belum tentu seluruhnya merupakan hak pemerintah daerah. Apabila dari jumlah kas di pemerintah daerah masih terdapat tagihan pihak ketiga yang belum dibayarkan yang berasal dari potongan yang dilakukan oleh pemerintah daerah misalnya potongan untuk Askes, Taspen, Taperum, kesalahan penyetoran, kesalahan pendebetn yang belum dikoreksi sampai akhir tahun anggaran maka jumlah potongan tersebut merupakan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (Utang PFK).

Kas Pemerintah Daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah terdiri dari:

- a. Kas di Bendahara Pengeluaran;
- b. Kas di Bendahara Penerimaan; dan
- c. Saldo kas lainnya yang diterima Kementerian Negara/Lembaga karena penyelenggaraan pemerintahan

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Umum Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari dana kas kecil (UP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Umum Daerah per tanggal neraca. Apabila terdapat bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan, maka hal ini harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Untuk mendapatkan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran perlu dilakukan:

- a. Inventarisasi fisik untuk menentukan saldo kas per tanggal neraca atas seluruh uang kartal (uang kertas dan logam) yang ada di tangan seluruh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP, termasuk bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan.
- b. Inventarisasi untuk menentukan saldo rekening koran seluruh Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca sehingga diketahui saldo seluruh uang giral yang menjadi tanggung jawab seluruh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP.
- c. Rekonsiliasi catatan yang ada di Bendahara Pengeluaran dengan seluruh saldo rekening koran sehingga diketahui sisa uang muka kerja yang seharusnya dengan benar.

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke kas umum daerah. Akun Kas di Bendahara Penerimaan yang disajikan dalam Neraca harus mencerminkan kas yang benar-benar ada pada tanggal neraca. Kas di Bendahara Penerimaan disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kas Pemerintah Daerah di Luar Pengelolaan Bendahara Umum Daerah merupakan Kas pemerintah daerah yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh selain Bendahara Umum Daerah meliputi:

- a. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan bukan bagian dari BUD;
- b. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran, apabila Bendahara Pengeluaran bukan bagian dari BUN/D;
- c. Saldo kas lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan; dan
- d. Saldo kas di BLU/BLUD.

Kas di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan bukan merupakan bagian dari BUD

Untuk melaksanakan penerimaan yang berasal dari kegiatan operasional, pemerintah menunjuk Bendahara Penerimaan yang bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan kas berasal dari penerimaan pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada kantor/satuan kerja pemerintah daerah. Pada akhir tahun anggaran, saldo kas di Bendahara Penerimaan adalah nihil. Apabila karena alasan tertentu masih terdapat uang daerah pada Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke kas negara pada tanggal neraca, maka jumlah tersebut dilaporkan dalam neraca sebagai Kas di Bendahara Penerimaan.

Kas di Bendahara Pengeluaran, apabila Bendahara Pengeluaran bukan bagian dari BUD

Untuk melaksanakan kegiatan operasional, Menteri/Pimpinan Lembaga menunjuk Bendahara Pengeluaran untuk mengelola uang yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja. Tugas Bendahara Pengeluaran adalah menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan kas untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga. Untuk keperluan kegiatan operasional tersebut, Bendahara Pengeluaran mengelola uang persediaan (UP)/tambahan uang persediaan (TUP) yang diterima dari BUN. Disamping mengelola uang persediaan (UP), Bendahara Pengeluaran juga mengelola uang lainnya, antara lain meliputi:

- a. Uang yang berasal dari Kas Negara, melalui SPM-LS/SP2D yang ditujukan kepadanya;
- b. Uang yang berasal dari potongan atas pembayaran yang dilakukannya sehubungan dengan fungsi bendahara selaku wajib pungut; dan
- c. Uang dari sumber lainnya yang menjadi hak negara.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pada akhir tahun anggaran Bendahara Pengeluaran harus segera menyetor seluruh sisa UP/TUP ke Kas Negara. Apabila karena alasan tertentu masih terdapat saldo UP/TUP pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Negara pada tanggal neraca, maka jumlah sisa UP/TUP tersebut harus dilaporkan dalam neraca sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran. Apabila pada tanggal neraca masih terdapat uang dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, jumlah tersebut dilaporkan di neraca sebagai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran.

Saldo Kas Lainnya yang Diterima karena Penyelenggaraan Pemerintahan

Kas di Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah

KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh piutang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas Pemerintah Kabupaten Badung tidak termasuk perusahaan daerah.

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya

Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

PENGAKUAN

Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :

- a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi ;
- b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- b. jumlah piutang dapat diukur;

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

- a. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
- b. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar

Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

PENGUKURAN

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:

- a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
- b. Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
- c. Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- d. Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (write-off) dan penghapusbukuan (write down).

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kualitas Piutang Lancar;
- b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- c. Kualitas Piutang Diragukan;
- d. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

- a. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (self assessment); dan
- b. Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (official assessment).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak likuid; dan/
 - 5) atau
 - 6) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria :
 - 1) Umur piutang lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (official assessment) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure)

- d. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat
- 1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 tahun;
- b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 sampai dengan 3 tahun;
- c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun;
- d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 5 tahun.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (≤ 1 tahun);
- b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan ($1 \text{ tahun} \leq 3$);
- c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; ($3 \text{ tahun} \leq 5 \text{ tahun}$);
- d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan (≥ 5 tahun).

PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, ditetapkan sebesar:

- a. Kualitas Lancar sebesar 0 %;
- b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c. Kualitas Diragukan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. Kualitas Macet 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan.

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

PENGUNGKAPAN

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b. rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya
- c. penjelasan atas penyelesaian piutang;
- d. jaminan atau sita jaminan jika ada.

Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan, tergantung dari jenis piutang.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

Pencatatan persediaan dilakukan dengan:

- a. Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya continues dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update.
- b. Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode.

PENGUKURAN

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/ harga pokok produksi terakhir/nilai wajar (FIFO).

Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

- a. persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- b. jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

Ruang Lingkup

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh investasi baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi investasi Pemerintah Kabupaten Badung baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang meliputi saat pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan metode penilaian investasi, serta pengungkapannya pada laporan keuangan.

Definisi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.

- Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.
- b.
 - c. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.
Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.
 - a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen
Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
 - b. Investasi Jangka Panjang Permanen
Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.
- Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.

PENGAKUAN

Suatu transaksi pengeluaran uang dan / atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:

Pengukuran investasi jangka pendek

- 1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
 - a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
 - b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- 2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya,.

Pengukuran investasi jangka panjang:

- 1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- 2) Investasi jangka panjang nonpermanen:
 - a) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
 - b) Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - c) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga

Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

a. Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Contoh :

Berdasarkan akta pendirian perusahaan A, Pemerintah Daerah memiliki saham sebesar 60%. Laporan keuangan perusahaan tersebut pada tanggal disusunnya neraca awal, menyajikan ekuitas sebesar Rp 500.000.000,00 Dengan demikian, nilai Penyertaan Modal Pemerintah tersebut, berdasarkan metode ekuitas adalah sebesar $60\% \times \text{Rp } 500.000.000,00 = \text{Rp } 300.000.000,00$.

C. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali. Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (aging schedule). Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- b.
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- d. Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (the degree of influence) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:

- a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;
- d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

PENGUNGKAPAN

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
- c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya
- f. Perubahan pos investasi.

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

PENGAKUAN ASET TETAP

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran *pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap* dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan Peralatan dan mesin sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke atas, kecuali untuk yang satu kesatuan barang (misalnya : sofa terdiri dari kursi + meja; alat bengkel; alat kesehatan/ bidan kit).
- b. Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, buku-buku perpustakaan, dan aset tetap lainnya tidak ada nilai minimum kapitalisasi (dikecualikan)

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke atas.

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar *pada saat perolehan*.

Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf 36 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan

secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- a. biaya perencanaan;
- b. biaya lelang;
- c. biaya persiapan tempat;
- d. biaya pengiriman awal (*initialdelivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handlingcost*);
- e. biaya pemasangan (*instalationcost*);
- f. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
- g. biaya konstruksi.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya administrasi dan umum lainnya ***bukan*** merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut ***tidak dapat*** diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut ***dapat diatribusikan*** pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.

Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan *secara proporsional dengan nilai aset, atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material*.

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset Tetap Digunakan Bersama

Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*writtendown*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*writtendown*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan *pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.*

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Pemeliharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan, ruas jalan, irigasi subak, jaringan sebesar Rp20.000.000,00 keatas.
- b) Pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp10.000.000,00 keatas.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

Pengungkapan Aset Tetap

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 - 1) penambahan;
 - 2) pelepasan;
 - 3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - 4) mutasi aset tetap lainnya.
- c. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

- a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
- d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:

- a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
- b. Tanggal efektif penilaian kembali;
- c. Jika ada, nama penilai independen;
- d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
- e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada saat dilakukan pembayaran belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Kontrak Konstruksi

70. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.

71. Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- a. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
- b. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
- c. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering* ;
- d. kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

Ketentuan- ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.

Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat dibawah ini terpenuhi:

- a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
- b. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
- c. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.

Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan kedalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:

- a. Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
- b. Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Biaya perencanaan dan pengawasan masih diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan selama pekerjaan belum selesai dibangun.

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan kekonstruksi tersebut; dan
- c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia
- b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi
- c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ketempat lokasi pekerjaan
- d. Biaya penyewaan sarana dan prasarana
- e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan kekegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:

- a. Asuransi;
- b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal
- c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan kemasing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *forcemajeur* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang

sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Realisasi atas pekerjaan jasa konsultans perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- d. Uang muka kerja yang diberikan; dan
- e. Retensi.

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

PENGAKUAN

Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- b. Diterima atau kepemilikannya dan / atau penguasaannya berpindah.

Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut.

Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Aset Bangun Kelola Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan.

Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut :

- a. Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.
- b. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 5 tahun.

Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.

PENGUNGKAPAN

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Rincian aset lainnya;
- b. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
- c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
- d. Informasi lainnya yang penting.

JENIS ASET TAK BERWUJUD

(a) *Goodwill*

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

(b) Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

(c) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

(d) Software

Software computer yang masuk dalam kategori Aset Tak Berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.

(e) Lisensi

Adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

(f) Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

(g) Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset Tak berwujud Lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

(h) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tak Berwujud yang bersangkutan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

PENGAKUAN

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)
- b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan
- c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)
- d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.

Utang perhitungan pihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.

Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/ jasa atau Surat Ketetapan atas pendapatan yang bersangkutan oleh pemerintah daerah.

Utang Beban, diakui pada saat:

- a. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- b. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
- c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.

Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.

Utang Restitusi diakui pada saat klaim dari pihak wajib pajak/ pembayar telah dilakukan penetapan jumlah melalui verifikasi/ audit dari tim yang minimal terdiri dari Dinas Pendapatan, Bagian Keuangan dan Inspektorat, dibuktikan dengan Berita Acara Verifikasi/ Audit.

Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila :

- a. barang yang dibeli sudah diterima, atau
- b. jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau
- c. sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima.

tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.

Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui diakui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

PENGUKURAN

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.

Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.

Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain. Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - 1) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - a) Pengurangan pinjaman;
 - b) Modifikasi persyaratan utang;
 - c) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - d) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - e) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - f) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan
 - 2) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
 - 3) Biaya pinjaman:
 - a) Perlakuan biaya pinjaman;
 - b) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - c) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

A. PENGAKUAN

1. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan earned.
 - b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized) maupun masih berupa piutang (realizable).
2. Pendapatan Asli Daerah dikelompokkan ke dalam tiga kategori,
 - a. PAD Melalui Penetapan
PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.
 - b. PAD Tanpa Penetapan
PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.
 - c. PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan
Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, dilakukan eksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.
3. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Pendapatan transfer diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.
4. Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.
5. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan telah diterima. Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

B. PENGUKURAN

6. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
7. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
8. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

C. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

9. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
10. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:
 - a. penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
 - d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

A. PENGAKUAN

1. Pendapatan-LRA diakui pada saat:
 - a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
 - b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
 - c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

B. PENGUKURAN

2. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto ,dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
3. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
4. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

C. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

5. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.
6. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah :
 - a. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
 - d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- a. Belanja Operasi
- b. Belanja Modal
- c. Belanja Tak Terduga

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

PENGAKUAN

Beban diakui pada:

- a. Saat timbulnya kewajiban;
- b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
- b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
- c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban atau diterimanya tagihan dari pihak ketiga walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan dokumen tagihan atau daftar/dokumen lain yang digunakan sebagai dasar pembayaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban yang telah dibayarkan oleh bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Beban dengan mekanisme uang panjar kepada PPTK akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah dilakukan Pertanggungjawaban(SPJ) panjar ke Bendahara Pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

- a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
- b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

- c. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- f. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

PENGUKURAN

Beban diukur sesuai dengan:

- a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
- b. Beban Transfer
- c. Beban Non Operasional
- d. Beban Luar Biasa

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

- a. Pengeluaran beban tahun berkenaan
- b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

PENGAKUAN

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized)

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

PENGUKURAN

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

PENILAIAN

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- a. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional. Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.
- b. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

PENGUNGKAPAN

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya

- b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya.
- c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
- b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.
- c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

PENGAKUAN

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

PENGUKURAN

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETTO

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.
Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN DANA BERGULIR

Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.

Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.

Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang.

Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.

Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

- (a) Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan
- (b) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

KEBIJAKAN AKUNTANSI

LAPORAN OPERASIONAL DAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian Laporan Operasional.

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi Pemerintah Kabupaten Badung dalam menyusun laporan operasional yang menggambarkan pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak termasuk perusahaan daerah.

Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis.

Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

Transaksi Pendapatan-LO

Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban.

KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN ARUS KAS

Kas dan Setara Kas

Setara kas pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan

ENTITAS PELAPORAN ARUS KAS

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau satuan organisasi lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah

yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah daerah.

Entitas yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan, dalam hal ini PPKD.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau satuan organisasi lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah

yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah daerah.

Entitas yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan, dalam hal ini PPKD.

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris.

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris.

Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pembiayaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi.

Contoh format laporan arus kas disajikan dalam Lampiran Kebijakan Akuntansi ini.

Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari antara lain

- a. Penerimaan Perpajakan;
- b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- c. Penerimaan Hibah;
- d. Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan Investasi Lainnya;
- e. Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan Luar Biasa; dan
- f. Penerimaan Transfer.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran, antara lain :

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang;
- c. Bunga;
- d. Subsidi;
- e. Hibah;
- f. Bantuan Sosial
- g. Belanja Lain-lain/Tak Terduga; dan
- h. Transfer Keluar.

Jika suatu entitas mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.

Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan

Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari:

- a. Penjualan Aset Tetap;
- b. Penjualan Aset Tetap
- c. Penjualan Aset Lainnya.
- d. Pencairan Dana Cadangan
- e. Penerimaan dari Divestasi
- f. Penjualan Investasi dalam bentuk sekuritas

Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari :

- a. Perolehan Aset Tetap;
- b. Perolehan Aset Lainnya.
- c. Pembentukan Dana Cadangan
- d. Penyertaan Modal Pemerintah
- e. Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas

Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

- a. Penerimaan Utang Luar Negeri;
- b. Penerimaan dari Utang Obligasi;
- c. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah;
- d. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara;

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain

- a. Pembayaran Pokok Utang Luar Negeri;
- b. Pembayaran Pokok Utang Obligasi;
- c. Pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan kepada pemerintah daerah;
- d. Pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan kepada perusahaan Negara.

Aktivitas Transitoris

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antarrekening kas umum negara/daerah.

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.

PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI ASET NONKEUANGAN, PEMBIAYAAN, DAN TRANSITORIS

Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris.

Entitas pelaporan menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara metode langsung. Metode langsung ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.

Penggunaan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi memiliki keuntungan sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasi arus kas di masa yang akan datang;
- b. Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan

- c. Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS BERSIH

Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal:

- a. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat (beneficiaries) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada aktivitas pemerintah daerah. Salah satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional.
- b. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat.

ARUS KAS MATA UANG ASING

Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs bank sentral pada tanggal transaksi.

Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs bank sentral pada tanggal transaksi.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.

BUNGA DAN BAGIAN LABA

Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran belanja untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.

Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.

Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.

INVESTASI DALAM PERUSAHAAN DAERAH DAN KEMITRAAN

Pencatatan investasi pada perusahaan daerah dan kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya.

Investasi pemerintah daerah dalam perusahaan daerah dan kemitraan dicatat dengan menggunakan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehannya.

Entitas pelaporan melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas pembiayaan.

PEROLEHAN DAN PELEPASAN PERUSAHAAN DAERAH DAN UNIT OPERASI LAINNYA

Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas pembiayaan.

Entitas pelaporan mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode. Hal-hal yang diungkapkan

- a. Jumlah harga pembelian atau pelepasan;
- b. Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas;
- c. Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan
- d. Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas.

Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran. Arus kas masuk dari pelepasan tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya.

Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan daerah.

TRANSAKSI BUKAN KAS/TRANSAKSI BUKAN KAS

Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas

periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.

KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS

Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

PENGUNGKAPAN LAINNYA

Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI NERACA

KLASIFIKASI

Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Apabila suatu entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- a. kas dan setara kas;
- b. investasi jangka pendek;
- c. piutang;
- d. persediaan;
- e. investasi jangka panjang;
- f. aset tetap;
- g. kewajiban jangka pendek;
- h. kewajiban jangka panjang;
- i. ekuitas.

Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam neraca jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan.

Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:

- a. Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
- b. Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas akuntansi/entitas pelaporan;

c. Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi dapat diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasikan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi/pelaporan. Oleh karena itu, laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan.

Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

STRUKTUR DAN ISI

Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca, harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan pada Laporan Keuangan SKPD, sedangkan untuk Laporan Keuangan PPKD selain sama dengan Laporan Keuangan SKPD, PPKD menyajikan referensi silang informasi terkait Laporan Arus Kas dan Laporan SAL.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain:

- a. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

- d. Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- f. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan mengikuti kebijakan akuntansi berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos yang berhubungan. Misalnya, kebijakan akuntansi tentang persediaan mengharuskan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.

Untuk memudahkan pembaca laporan, pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan

Penyajian Informasi Umum Tentang Entitas Pelaporan Dan Entitas Akuntansi

Catatan Atas Laporan Keuangan Harus Mengungkapkan Informasi Yang Merupakan Gambaran Entitas Secara Umum.

Untuk Membantu Pemahaman Para Pembaca Laporan Keuangan, perlu ada penjelasan awal mengenai baik entitas pelaporan maupun entitas akuntansi yang meliputi:

- a. adomisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berada;
- b. penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; dan
- c. ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

Penyajian Informasi tentang Kebijakan Fiskal/Keuangan, Ekonomi Makro, Pencapaian Target Peraturan daerah tentang APBD, Berikut Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Target

Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat membantu pembacanya untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan entitas akuntansi/pelaporan secara keseluruhan, termasuk kebijakan fiskal/keuangan dan kondisi ekonomi makro.

Untuk membantu pembaca Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana perkembangan posisi dan kondisi keuangan/fiskal entitas akuntansi/pelaporan serta bagaimana hal tersebut tercapai. Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, entitas akuntansi/pelaporan harus menyajikan informasi mengenai perbedaan yang penting posisi dan kondisi keuangan/fiskal periode berjalan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran, dan dengan rencana lainnya sehubungan dengan realisasi anggaran. Termasuk dalam penjelasan perbedaan adalah perbedaan asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan anggaran dibandingkan dengan realisasinya.

Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam kebijakan penyusunan APBD, sasaran, program dan prioritas anggaran, kebijakan intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.

Kondisi ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak dan tingkat suku bunga.

Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas akuntansi/entitas akuntansi/pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan.

Dalam satu periode pelaporan, dikarenakan alasan dan kondisi tertentu, entitas pelaporan mungkin melakukan perubahan anggaran dengan persetujuan DPRD. Agar pembaca laporan keuangan dapat mengikuti kondisi dan perkembangan anggaran, penjelasan atas perubahan-perubahan yang ada, yang disahkan oleh DPRD, dibandingkan dengan anggaran pertama kali disahkan akan membantu pembaca dalam memahami kondisi anggaran dan keuangan entitas akuntansi/pelaporan.

Dalam kondisi tertentu, entitas akuntansi/pelaporan belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan, misalnya jumlah unit pembangunan bangunan sekolah

dasar. Penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang ada, misalnya kurangnya ketersediaan lahan, perlu dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Ikhtisar pencapaian target keuangan merupakan perbandingan secara garis besar antara target sebagaimana yang tertuang dalam APBD dengan realisasinya. Ikhtisar disajikan untuk memperoleh gambaran umum tentang kinerja keuangan pemerintah dalam merealisasikan potensi pendapatan-LRA dan alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam APBD.

Ikhtisar disajikan baik untuk pendapatan-LRA, belanja, maupun pembiayaan dengan struktur sebagai berikut:

- a. nilai target total;
- b. nilai realisasi total;
- c. prosentase perbandingan antara target dan realisasi; dan
- d. alasan utama terjadinya perbedaan antara target dan realisasi.

Untuk membantu pembaca laporan keuangan, manajemen entitas akuntansi/pelaporan mungkin merasa perlu untuk memberikan informasi keuangan lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca, misalnya kewajiban yang memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran periode mendatang.

Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi Keuangan

Dalam menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan, entitas akuntansi/ pelaporan harus mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan

Asumsi Dasar Akuntansi

Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut disertai alasan dan penjelasan.

Sesuai dengan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar Kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

- (a) Asumsi kemandirian entitas;
- (b) Asumsi kesinambungan entitas; dan

(c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah daerah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Kebijakan Akuntansi

Pertimbangan dan/atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu disesuaikan dengan kondisi entitas pelaporan. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi entitas pelaporan secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan kegiatan.

Tiga pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi yang paling tepat dan penyiapan laporan keuangan oleh manajemen:

- (b) Ketidakpastian melingkupi banyak transaksi. Hal tersebut seharusnya diakui dalam penyusunan laporan keuangan. Sikap hati-hati tidak membenarkan penciptaan cadangan rahasia atau disembunyikan

- (c) Substansi Mengungguli Bentuk
Transaksi dan kejadian lain harus dipertanggungjawabkan dan disajikan sesuai dengan hakekat transaksi dan realita kejadian, tidak semata-mata mengacu bentuk hukum transaksi atau kejadian.

- (d) Materialitas
Laporan keuangan harus mengungkapkan semua komponen yang cukup material yang mempengaruhi evaluasi atau keputusan-keputusan.

Pengungkapan Kebijakan Akuntansi

Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam catatan atas laporan keuangan harus dapat menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dan metode

Secara umum kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut:

- (a) Entitas akuntansi / entitas pelaporan
- (b) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- (c) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan
- (d) Penerapan PSAP dalam kebijakan-kebijakan akuntansi.
- (e) Kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan

Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.

KEBIJAKAN AKUNTANSI, KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI, DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung.

KEBIJAKAN AKUNTANSI HIBAH

Pendapatan Hibah adalah penerimaan negara/daerah dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah lain, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan yang tidak perlu dibayar kembali.

Jenis dan Klasifikasi Pendapatan Hibah

Klasifikasi Pendapatan Hibah:

- a. Pendapatan Hibah menurut mekanisme penganggaran
 1. Hibah yang direncanakan
Hibah yang direncanakan adalah Hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran dan diterima oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum (BUD).
 2. Hibah Langsung
Hibah langsung adalah Hibah yang diterima langsung oleh SKPD tanpa melalui entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan (BUD). Hibah ini tidak masuk dalam perencanaan karena hibah diterima tanpa ada naskah perjanjian sebelumnya.
Namun demikian, hibah langsung yang diterima dalam periode tahun berjalan dan dapat dimasukkan dalam dokumen perubahan anggaran pada saat penyusunan perubahan anggaran, maka hibah langsung dimaksud dapat beralih menjadi hibah yang direncanakan.

- b. Pendapatan Hibah menurut bentuknya
 1. Dalam bentuk uang berupa rupiah, valuta asing atau devisa yang dirupiahkan;
 2. Dalam bentuk surat berharga;
 3. Dalam bentuk barang; dan
 4. Dalam bentuk jasa termasuk asistensi, tenaga ahli, beasiswa dan pelatihan.
- c. Pendapatan Hibah menurut sumbernya
 1. Pendapatan hibah dalam negeri yang berasal dari:
 - a) Pemerintah pusat bila diterima oleh pemerintah daerah;
 - b) Pemerintah daerah bila diterima oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya.
 - c) Institusi/Lembaga di dalam negeri termasuk masyarakat dan kelompok masyarakat
 2. Pendapatan Hibah luar negeri yang berasal dari:
 - a) Negara asing;
 - b) Lembaga donor multilateral;
 - c) Lembaga keuangan asing; dan
 - d) Lembaga non keuangan asing.

Akuntansi Pendapatan Hibah

1. Pengakuan Pendapatan Hibah Basis Akrua

Pengakuan pendapatan pada akuntansi berbasis akrual terjadi pada saat hak pemerintah timbul yang akan menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran berjalan serta tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan hibah berbasis akrual diakui pada saat hak pemerintah timbul.

Pendapatan hibah pada akuntansi berbasis akrual disajikan di Laporan Operasional.

Pendapatan berbasis akrual diakui pada saat timbulnya hak untuk memperoleh pendapatan tersebut walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan (PP 71/2010, Lampiran I, KK Paragraf 42).

Pendapatan hibah berbasis akrual diakui pada saat:

- Pendapatan tersebut dapat diidentifikasi secara spesifik;
- Besar kemungkinan bahwa sumber daya tersebut dapat ditagih; dan
- Jumlahnya dapat diestimasi secara andal

Realisasi pendapatan hibah sangat bergantung dari keinginan/niat pemberi hibah untuk mengeksekusinya. Komitmen dari pemberi hibah masih akan terlalu dini untuk diakui sebagai pendapatan hibah-LO mengingat untuk dapat direalisasikan akan sangat dipengaruhi oleh berbagai hal yang ada di luar kontrol penerima hibah, kemungkinan besar tidak dapat diestimasi terlebih dahulu, serta tidak terlalu besar kekuatan pemerintah untuk

Berdasarkan hal tersebut, pendapatan hibah-LO diakui pada saat dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah. Pemenuhan persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Apabila pemberi hibah akan mengeluarkan dana atau memberikan barang dengan persyaratan tertentu, maka pendapatan hibah diakui pada saat entitas penerima hibah telah melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan tersebut.
- b. Apabila pemberi hibah akan mengeluarkan dana atau memberikan barang tanpa persyaratan tertentu, maka:
 - i. terhadap pemberian hibah yang didasari oleh perjanjian antara pemberi dan penerima hibah, maka pendapatan hibah diakui setelah timbulnya hak yang ditandai dengan perjanjian hibah ditandatangani.
 - ii. Ada pemberi hibah mengeluarkan dana atau memberikan barang tanpa persyaratan tertentu, maka pendapatan hibah diakui pada saat dana hibah/barang tersebut diterima.

Pendapatan hibah pada akuntansi berbasis akrual disajikan di Laporan Operasional.

Selain disajikan di Laporan Operasional, pendapatan hibah juga tetap harus disajikan di Laporan Realisasi Anggaran dengan menggunakan basis kas, hal tersebut karena Laporan Realisasi Anggaran merupakan statutory report .

Untuk pendapatan hibah langsung yang diterima SKPD dan telah memenuhi kriteria pengakuan Pendapatan-LO, maka pendapatan hibah-LO diakui pada saat diterima oleh SKPD penerima.

2. Pengukuran

Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai nominal hibah yang diterima atau yang menjadi hak. Sedangkan pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/jasa yang diserahkan berdasarkan berita acara serah terima, dan jika data tersebut tidak dapat diperoleh, maka dicatat berdasarkan nilai wajar.

Hibah yang diterima dalam bentuk surat berharga dinilai berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima oleh Pemberi Hibah dan Pemerintah Daerah untuk dicatat di dalam Laporan Keuangan.

3. Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan Hibah dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Pendapatan hibah juga disajikan pada Laporan Operasional yang dikelompokkan ke dalam Pendapatan Operasional. Jika ada beban/biaya yang harus dikeluarkan terkait dengan pendapatan hibah yang diterima maka disajikan dalam kelompok beban operasional.

Disamping disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional, transaksi hibah juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan belanja hibah yang diterima/dikeluarkan.

Jenis informasi atas transaksi hibah yang dapat dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan, antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran atas transaksi hibah;
- b. Penjelasan pencapaian transaksi hibah terhadap target yang ditetapkan dalam undang-undang APBN, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target selama tahun pelaporan;
- c. Informasi rinci tentang sumber-sumber atau jenis-jenis hibah;
- d. Jenis hibah, apakah berupa uang, barang, jasa, ataupun surat berharga.

Definisi Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa yang dapat diberikan kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, pemerintah pusat/daerah, perusahaan negara/daerah, masyarakat, kelompok masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Beban hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

1. Pengakuan Belanja dan Beban Hibah Basis Akrual

Beban hibah diakui pada saat dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah. Pemenuhan persyaratan tersebut antara lain:

- a. dana hibah akan dikeluarkan jika penerima hibah sudah melaksanakan suatu kegiatan atau persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui pada saat penerima hibah telah melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan tersebut.
- b. dana hibah dikeluarkan tanpa persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui pada saat dikeluarkan dana hibah tersebut.

2. Pengukuran

Belanja hibah dicatat sebesar nilai nominal yang dikeluarkan atau menjadi kewajiban hibah.

3 Penyajian

Realisasi belanja dan beban hibah disajikan dalam mata uang rupiah. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan klasifikasibelanja hibah menurut jenis belanja, organisasi dan. menurut fungsi dalam Laporan Realisasi Anggaran Belanja.

Pada penerapan akuntansi berbasis akrual beban hibah juga disajikan pada Laporan Operasional pada Pos Operasional.

4. Pengungkapan

Di samping disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional, transaksi hibah juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai belanja hibah yang dikeluarkan.

Jenis informasi atas transaksi belanja hibah yang dapat dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan, antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran atas transaksi belanja hibah;
- b. Informasi rinci tentang jenis-jenis belanja hibah dan penerima hibah;
- c. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.